

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENGAWASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANTARA INDONESIA  
DAN THAILAND DALAM ADOPSI PRAKTIK TERBAIK  
PEMBANGUNANAN ALTERNATIF OLEH BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
dalam bidang Hubungan Internasional**



**Oleh  
Nabila Kamalia  
NIM I92219084**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
JUNI 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabila Kamalia  
NIM : 192219084  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Implementasi Kerja Sama Pengawasan Penyalahgunaan  
Narkotika antara Indonesia dan Thailand dalam Adopsi Praktik  
Terbaik Pembangunan Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional  
Republik Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 2 Juni 2023

Yang menyatakan



Nabila Kamalia

NIM : 192219084

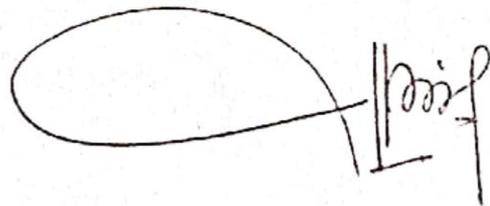
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, koreksi, dan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Kamalia  
NIM : I92219084  
Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **Implementasi Kerja Sama Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika antara Indonesia dan Thailand dalam Adopsi Praktik Terbaik Pembangunan Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia**, saya berpendapat bahwa skripsi ini dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 21 Juni 2023



**Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S. I. P., M.A., CIQR.**

**NIP 198408232015031002**

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Nabila Kamalia dengan judul **“Implementasi Kerja Sama Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika antara Indonesia dan Thailand dalam Adopsi Praktik Terbaik Pembangunan Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 27 Juni 2023.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Muhammad Qobidi Ainul Arif, S.I.P.,  
M.A., CIQnR.  
NIP 198408232015031002

Penguji II



Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.  
NIP 196811291996031003

Penguji III



Nur Luthfi Hidayatullah, S.I.P., M.Hub.Int.  
NIP 199104092020121012

Penguji IV



Zudan Rosyidi, M.A.  
NIP 198103232009121004

Surabaya, 13 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. Abd. Chalik, M.Ag.  
NIP 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabila Kamalia  
NIM : 192219084  
Fakultas/Jurusan : F151P / Hubungan Internasional  
E-mail address : nabilakamalia18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Kerja Sama Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika  
antara Indonesia dan Thailand dalam Adopsi Praktik Terbaik Pembangunan  
Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Penulis

( Nabila Kamalia )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRACT

**Nabila Kamalia, 2023.** *"Implementation of Cooperation in Monitoring Narcotics Abuse between Indonesia and Thailand in the Adoption of Alternative Development Best Practices by the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia"*.

*This study aims to determine the implementation of cooperation between Indonesia and Thailand in overcoming the problem of drug abuse through the Alternative Development program in Indonesia by the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (BNN RI). The researcher used a qualitative approach with descriptive research questions. In collecting data, the researcher conducted documentation and interview techniques. The data analysis technique uses an interactionist analysis technique model according to Miles and Huberman. The researcher found that there are four forms of implementation of cooperation between Indonesia and Thailand in implementing the Alternative Development program in Indonesia by BNN RI. First, the form of implementation through institutional capacity building. Second, the implementation of cooperation through working visits in alternative development programs. Third, the form of implementation through land and profession conversion activities in the Grand Design of Alternative Development program (GDAD). Fourth, the implementation of cooperation through bilateral meetings between the Indonesian National Narcotics Agency and the Royal Thai Narcotics Supervisory Agency (ONCB). The form of implementation through land and profession conversion activities in the Grand Design of Alternative Development program (GDAD).*

**Keywords:** *Implementation, cooperation, drug abuse, Indonesia, Thailand, Alternative Development, National Narcotics Agency.*

## ABSTRAK

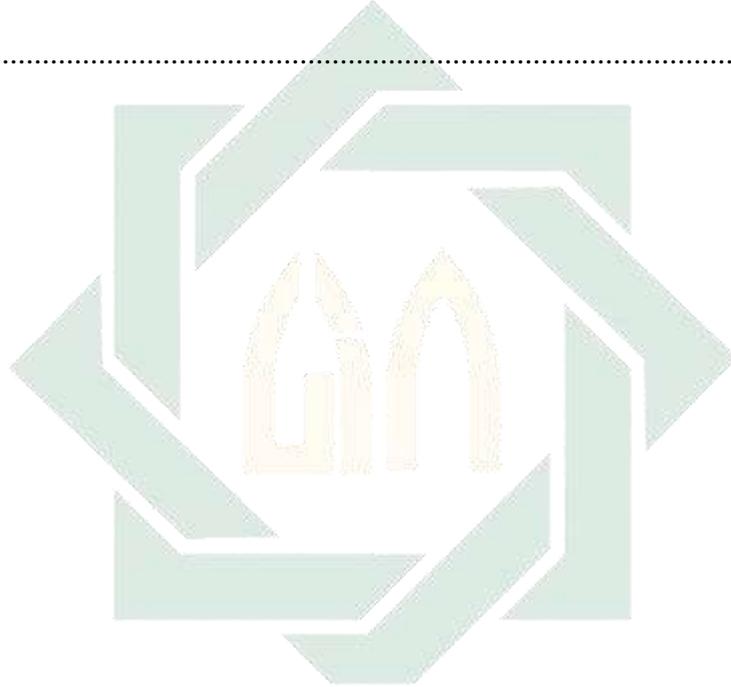
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika melalui program Pembangunan Alternatif di Indonesia oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan model teknik analisis interaksionis menurut Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa terdapat empat bentuk implementasi kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di Indonesia oleh BNN RI. Pertama, bentuk implementasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. Kedua, implementasi kerja sama melalui kunjungan kerja dalam program Pembangunan Alternatif. Ketiga, bentuk implementasi melalui kegiatan alih fungsi lahan dan profesi dalam program *Grand Design of Alternative Development* (GDAD). Keempat, implementasi kerja sama melalui *bilateral meeting* antara BNN RI dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Argumentasi Utama.....	20
G. Sistematika Penulisan Laporan .....	20
<b>BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Kerja Sama Bilateral .....	22
B. Konsep Implementasi .....	24



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96
<b>LAMPIRAN</b> .....	107



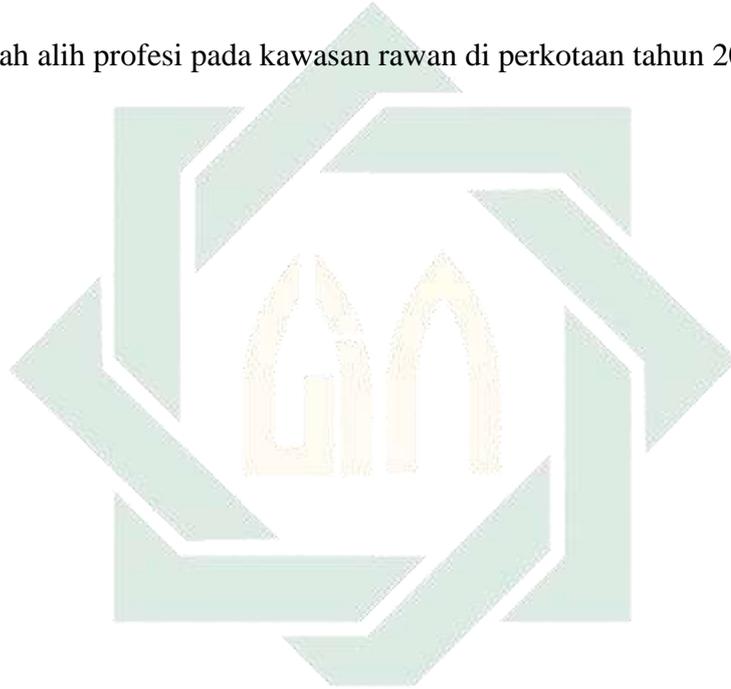
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 dan 2021 (dalam %)	3
Gambar 2.1 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand	27
Gambar 3.1 Komponen analisis data: model interaktif	41
Gambar 4.1 Jenis narkoba paling banyak dikonsumsi pada tahun 2019	47
Gambar 4.2 Luas (hektar) sitaan lahan kultivasi ganja di Provinsi Aceh (2015-2019)	48
Gambar 4.3 Pertemuan <i>bilateral meeting</i> yang pertama antara BNN RI dan ONCB Thailand pada 2019	88
Gambar 4.4 Pertemuan <i>bilateral meeting</i> yang kedua antara BNN RI dan ONCB Thailand pada 2022	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data kawasan rawan ganja yang dialihfungsikan menjadi lahan produktif pada tahun 2019 .....	82
Tabel 4.2 Jumlah alih profesi pada kawasan rawan di perkotaan tahun 2019 .....	83



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan transnasional (*transnational organized crime*) merupakan kejahatan lintas negara yang melanggar hukum-hukum di suatu negara dan berpengaruh pada keamanan di negara lain.<sup>2</sup> Permasalahan narkoba sebagai salah satu isu kejahatan transnasional yang terorganisir dan cukup serius karena dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan negara. Permasalahan narkoba tergolong sebagai bentuk ancaman non-militer yang dapat mengancam ketahanan negara sekaligus menjadi fenomena yang kompleks sebab menyangkut pada berbagai dimensi, seperti hukum, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta menjadi ancaman bagi keamanan manusia (*human security*). Hal tersebut dikarenakan bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melewati batas negara. Melihat begitu kompleksnya dampak yang ditimbulkan, maka dalam menangani masalah narkoba tersebut diperlukan peran dan sinergitas dari berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri guna melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Menurut *world drug problem annual report 2016*, ditemukan bahwa 73,8% dari populasi dunia dengan rentan usia 15-69 tahun atau sekitar 128,5 juta jiwa penyalahguna narkoba jenis ganja. Sedangkan di kawasan Asia,

---

<sup>2</sup> Ekho Jamaluddin P. Nalole, Judhariksawan, dan Karita Sakharina, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkoba sebagai Kejahatan Transnasional," *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11 No. 1, hal. 198.

jumlah penyalahguna ganja diperkirakan 11,2% atau sebanyak 14,39 juta jiwa. Tingginya angka tersebut membuat isu penyalahgunaan narkotika juga menjadi agenda dalam diskusi-diskusi organisasi internasional. Seperti halnya telah dilakukan pertemuan melalui sidang umum PBB yang digelar di Amerika Serikat guna membahas secara khusus permasalahan narkotika.<sup>3</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami permasalahan narkotika cukup serius. Jumlah populasi penduduk Indonesia yang padat yaitu sejumlah 273.879.750 jiwa pada tahun 2021<sup>4</sup>, menjadikan salah satu faktor pemicu kemungkinan dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2021 yaitu sejumlah 1,95%. Hal ini menunjukkan bahwa 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam setahun terakhir. Sementara angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57% yang artinya 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba. Dapat dilihat bahwa angka prevalensi pernah pakai lebih besar daripada setahun pakai, yang mana menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam satu tahun terakhir sudah tidak lagi menggunakan narkoba.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> BNN RI, *Grand Design Alternative Development dalam Rangka Pengentasan Produksi Ganja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Aceh (Tahun 2016-2025)*, (Jakarta), hal. 7.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri", 2022, diakses 14 November 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>.

<sup>5</sup> BNN RI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Republik Indonesia, 2022), hal. 65-66.



mencapai 2.105 kasus dengan 3.690 tersangka di tahun 2021 yang menjadikan wilayah Sumatra Utara menjadi wilayah pengungkapan kasus narkoba terbesar yaitu dengan jumlah 6.077 kasus.<sup>7</sup> Sedangkan di wilayah Aceh telah dijadikan sebagai penanaman narkoba jenis ganja terbesar di Indonesia. Berdasarkan pada hasil survei pada tahun 2019 menyatakan bahwa ditemukan 65% peredaran jenis ganja berada Aceh.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, di Indonesia sendiri penggunaan ganja telah dilarang karena pengaruh yang diakibatkan, yaitu menyebabkan kecanduan, halusinasi, depresi, serta berdampak negatif bagi kesehatan. Di samping dampak tersebut, pengguna ganja juga bisa dikenakan hukuman sebab dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja tergolong sebagai narkotika golongan I.

Upaya yang dilakukan BNN RI guna menangani isu narkotika dalam negerinya yakni dengan bersinergitas untuk menjalin hubungan bilateral dengan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (*Office of the Narcotics Control Board Thailand*). Thailand sendiri merupakan salah satu kawasan *golden triangle* (segitiga emas) dengan penghasil opium dan juga mengalami permasalahan narkotika yang cukup serius. Kedua negara melakukan kerja sama dalam program Pembangunan Alternatif (*Alternative*

---

<sup>7</sup> BNN RI, *INDONESIA DRUGS REPORT 2022*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022), hal. 28.

<sup>8</sup> Jasrilwin, "Harmonisasi Program Grand Design Alternative Development (GDAD) bersama Stakeholder," Website Pemerintah Gayo Lues, 2021, <https://gayolueskab.go.id/berita/kategori/kabar-daerah/harmonisasi-program-grand-design-alternative-development-gdad-bersama-stakeholder>.

*Development*). Awal kerja sama keduanya telah dilakukan dengan penandatanganan MoU pada 8 Desember 2016 lalu di Jakarta.<sup>9</sup>

Faktor yang mendasari Indonesia dalam melakukan kerja sama dengan Thailand dalam program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) yaitu bercermin atas keberhasilan Thailand selama 30 tahun dalam melaksanakan program *Alternative Development* tersebut di Provinsi Chiang Rai, Doi Tung. Wilayah Doi Tung sendiri awalnya merupakan wilayah perbukitan tandus serta masyarakatnya yang dilanda kemiskinan, sehingga menanam opium dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk bertahan hidup. Menanggapi situasi tersebut, Mae Fah Luang selaku permaisuri kerajaan Thailand mengatasi permasalahan tersebut dengan mendirikan sebuah proyek yang telah dijalankan mulai tahun 1988 hingga 2017 yang dinamakan sebagai *Doi Tung Development Project* (DSDP). Dengan adanya proyek tersebut, kawasan Doi Tung sekarang menjadi kawasan agrowisata maupun agrobisnis, dimana yang awalnya ditanami opium kemudian dialihfungsikan dengan tanaman kopi, sutra, dan macadamia. Pada tahun 2003 lalu, UNODC telah mengapresiasi proyek tersebut sebagai artifisial dari dari program *Alternative Development*. Hingga kemudian pada tahun 2009 UNODC memberikan penghargaan kepada Thailand sebagai *best practice* program *Alternative Development* di wilayah Doi Tung.

Selain hal tersebut, faktor lain yang mendasari hubungan kerja sama keduanya yaitu mengingat bahwa Thailand merupakan salah satu wilayah

---

<sup>9</sup> Dayamas, "Bilateral Meeting Indonesia dan Thailand dalam P4GN", BNN RI, 2019, diakses 8 Februari 2023, <https://bnn.go.id/bilateral-meeting-indonesia-thailand-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan/>.

yang berada di kawasan *Golden Triangle* (Segitiga Emas) yakni kawasan yang menjadi penghasil dan penyuplai narkotika jenis opium terbesar di dunia termasuk Indonesia. Kawasan *Golden Triangle* sendiri terdiri dari tiga negara, antara lain Thailand, Laos, dan Myanmar. Ketiga negara tersebut menjadi pusat produsen yang mengedarkan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara. Opium yang diproduksi bisa mencapai 65% dari total produksi opium dunia yang kemudian disuplai ke berbagai negara termasuk Indonesia.<sup>10</sup> Faktor-faktor tersebutlah yang mendasari Indonesia melakukan program Pembangunan Alternatif dengan berfokus menekan permasalahan narkotika dengan menggandeng Thailand.

Pelaksanaan Program pembangunan Alternatif di Indonesia sendiri telah dirintis sejak tahun 2006, yang mana dalam pelaksanaannya Provinsi Aceh dijadikan sebagai *pilot project* program Pembangunan Alternatif di Indonesia sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan ganja. Lalu pada tahun 2008, yayasan *Mae Fah Luang Foundation The Royal Patronage* dari Thailand memberikan bantuan secara langsung dengan dikembangkannya *Pilot Project Acehness Sustainable Alternative Livelihood Development* (SALD) yang bertujuan untuk mengalihfungsikan lahan ganja di Aceh menjadi lahan yang menanam komoditas yang produktif. Program Pembangunan Alternatif ini dilaksanakan di Aceh karena didasari alasan bahwa Aceh merupakan kawasan yang ditanami narkoba jenis ganja terbesar di Indonesia. Pada bulan Desember 2011, BNN beserta kepolisian berhasil

---

<sup>10</sup> Peter Chalk, *Grey Area Phenomena in SouthEast Asia: Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pasific and Asian Studies the Australian National University, 1977, hal. 42-43.

melakukan penemuan 155 hektar ladang ganja di Aceh. Penemuan tersebut berasal lebih dari sepuluh titik yang tersebar di lima kawasan hukum Polres Aceh, yakni Polres Aceh Besar, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, serta Bireun.<sup>11</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkotika merupakan ancaman yang serius bagi negara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku badan yang mengatasi permasalahan narkotika merancang sebuah konsep yaitu *Grand Design Alternative Development* (GDAD) yang merupakan imitasi dari program *Alternative Development* sebagai langkah untuk menangani permasalahan narkotika terutama ganja di Indonesia melalui cara yang humanis dan pendekatan kesejahteraan serta berkelanjutan dengan mengubah lahan ganja dengan digantikan sebagai lahan yang produktif, mengembangkan agrowisata, serta peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan peduli lingkungan. BNN memilih tiga wilayah sebagai *pilot project* dalam program ini, yakni wilayah Gayo Lues, Aceh Besar, dan Bireuen. Di ketiga wilayah tersebut pernah ditemukan ladang ganja, BNN menemukan ladang ganja seluas 5 hektar di masing-masing wilayah di Gayo Lues dan Aceh Besar yang siap panen.<sup>12</sup> Sedangkan untuk wilayah Bireuen juga pernah ditemukan ladang ganja dengan luas 6 hektar siap panen.<sup>13</sup> Pada penemuan tersebut dilakukan

---

<sup>11</sup> DetikNews, "Ini 5 Ladang Ganja Terlulus di Indonesia", 2012, diakses 14 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-1970357/ini-5-ladang-ganja-terluas-di-indonesia/6>.

<sup>12</sup> Rasidan, "BNN Musnahkan 5 Hektare ladang Ganja Siap Panen di Gayo Lues, Tim Jalan Kaki 6 jam ke Lokasi", Serambinews, 2022, <https://aceh.trinumnews.com/2022/06/01/bnn-musnahkan-5-hektarre-ladang-ganja-siap-panen-di-gayo-lues-tim-jalan-kaki-6-jm-ke-lokasi> diakses pada 2 Juli 2023.

<sup>13</sup> Tommy, "Polisi Temukan 6 Hektar lahan ganja di Pedalaman Bireuen", 2022, <https://www.ajnn.net/news/polisi-temukan-6-hektar-ladang-ganja-di-pedalaman-bireuen/index.html> diakses pada 2 Juli 2023.

aksi pemusnahan ladang ganja oleh BNN dan dibantu kepolisian setempat Selain karena kasus penemuan ladang ganja disana, pemilihan ketiga wilayah tersebut juga didasari oleh faktor bahwa mengetahui kondisi wilayah yang rawan akan narkoba jenis ganja serta Aceh berada di urutan ke-6 sebagai wilayah paling miskin di Indonesia, dimana menurut data dari BPS Aceh menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2020 mencapai presentase 15,43%.<sup>14</sup>

Upaya BNN dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif tersebut didampingi Yayasan Mae Fah Luang *Foundation* dari Thailand yang sudah berdiri pada tahun 1985<sup>15</sup> sehingga telah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan program tersebut serta berhasil dalam mengubah wilayah Doi Tung yang awalnya kawasan tertinggal dan ditanami opium kini menjadi kawasan agrowisata dan agrobisnis<sup>16</sup> serta peran dari Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB) sebagai pen jembatan antara BNN dan Mae Fah Luang *Foundation* dalam program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*). Melihat fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa Thailand telah lebih dulu dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di negaranya sedangkan Indonesia baru mulai merintis program tersebut pada tahun 2006. Oleh sebab itu, Indonesia menjalin kerjasama

---

<sup>14</sup> Agus Setyadi, "Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin di Indonesia", *detiknews*, 2021, diakses 15 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera/amp#referrer=https://www.google.com&csi=0>.

<sup>15</sup> Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi, *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta, 2011), hal. 111.

<sup>16</sup> Nugroho Tri Laksono, "BNN akan Sulap Ladang Ganja Aceh Jadi Agrowisata dan Agrobisnis", *detiknews*, 2016, diakses 8 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3365987/bnn-akan-sulap-ladang-ganja-aceh-jadi-agrowisata-dan-agrobisnis>.

dengan Thailand untuk mengadopsi dan mempelajari keberhasilan Thailand dalam melaksanakan program tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk dan berinisiatif untuk meneliti sejauh mana implementasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba antara Indonesia dan Thailand dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif oleh BNN RI.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dijawab peneliti pada penelitian ini yaitu: "Bagaimana implementasi kerja sama pengawasan penyalahgunaan narkoba antara Indonesia dan Thailand dalam adopsi praktik terbaik Pembangunan Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai implementasi kerja sama pengawasan penyalahgunaan narkoba antara Indonesia dan Thailand dalam adopsi praktik terbaik Pembangunan Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Peneliti berharap bahwa tulisan ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi Studi Hubungan Internasional, terutama pada kajian kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang menjadi permasalahan di Indonesia. Di samping itu, peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini mampu menjadi batu loncatan untuk

peneliti lainnya yang mengangkat pembahasan mengenai pelaksanaan program Pembangunan Alternatif yang dijalankan BNN RI untuk mengatasi permasalahan narkoba melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Narkoba Kerajaan Thailand.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi suatu instansi, lembaga-lembaga, maupun organisasi internasional yang bertujuan dalam penanganan permasalahan narkoba agar alat dalam pertimbangan kajian berikutnya. Tak hanya itu, pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum terkait kejahatan transnasional yaitu permasalahan narkoba dalam suatu negara khususnya Indonesia, sehingga bisa bermanfaat di masa yang akan datang.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai tumpuan dalam melakukan penelitian serta menjadi pembeda terhadap studi yang dikaji oleh peneliti sehingga penelitian yang dikaji mempunyai elemen keotentikan. Penelitian ini akan menyajikan beberapa tinjauan pustaka yang dibagi menjadi 4 kategori yakni penelitian terdahulu terkait hubungan kerja sama antara BNN RI dan ONCB Thailand dalam pengawasan narkoba, penelitian terdahulu terkait pelaksanaan program Pembangunan Alternatif di Aceh, penelitian terdahulu terkait kebijakan Indonesia dalam mengatasi *drug trafficking*, dan penelitian terdahulu terkait upaya dalam pencegahan permasalahan narkoba.

Kategori pertama, yakni penelitian terdahulu terkait hubungan kerja sama antara BNN RI dan ONCB Thailand dalam pengawasan narkoba.

Skripsi dengan judul "Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Office Of The Narcotics Control Board Thailand* (ONCB Thailand) dalam Mengatasi Narkoba di Indonesia Tahun 2019-2020" karya M. Irgi Prayoga dari Universitas Sriwijaya Palembang.<sup>17</sup> Hasil dari tulisan tersebut memaparkan bahwa Indonesia melalui BNN RI dan Thailand melalui ONCB Thailand melaksanakan berbagai bentuk kerja sama untuk memerangi peredaran gelap narkoba yang telah disepakati dengan ditandatanganinya MoU pada 8 Desember 2016. Implementasi dari kerja sama tersebut dilakukan dengan pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, pertukaran praktik, dan pemberdayaan sumber daya dalam melakukan pembangunan alternatif. Persamaan dengan tulisan yang akan dilakukan peneliti yakni keduanya sama-sama mengkaji mengenai kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Thailand guna mengatasi peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia. Namun berbeda dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya, dimana pada penelitian kali ini akan lebih berfokus mengenai implementasi dari kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam menangani permasalahan narkoba melalui program Pembangunan Alternatif dengan menjadikan Provinsi Aceh sebagai *pilot project* pelaksanaan program tersebut.

---

<sup>17</sup> M. Irgi Prayoga, "Kerja sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *The Office Of The Narcotics Control Board Thailand* (ONCB Thailand) dalam Mengatasi Narkoba di Indonesia Tahun (2019-2020)", (Skripsi, Universitas Sriwijaya), 2021.

Artikel jurnal dengan judul "Kerja Sama Indonesia-Thailand dalam Pemberantasan Narkoba Menuju *Drug-Free* ASEAN 2015" karya Sarah Tabitha, Nurmasari Situmeang, dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dari UPN Veteran Jakarta.<sup>18</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi kerja sama Indonesia dengan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan *Drug Free* ASEAN 2015 khususnya bekerja sama dengan Thailand. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Thailand menggunakan dua strategi, yaitu dengan melakukan berbagai kunjungan, pertukaran informasi, *alternative development*, dan penerapan *law enforcement* di Indonesia dan Thailand sebagai persamaan hukum dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba. Persamaan tulisan tersebut dengan tulisan yang akan dikaji peneliti yaitu sama-sama membahas terkait hubungan kerja sama Indonesia dan Thailand dalam mengatasi isu narkoba yang telah menjadi ancaman setiap negara. Namun yang menjadi perbedaan yaitu pada fokus penelitiannya dimana pada penelitian tersebut membahas secara luas implementasi dari kerja sama keduanya, sementara pada kajian ini berfokus pada penerapan kerja sama kedua negara dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) di Indonesia oleh BNN RI.

Skripsi dengan judul "Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan *Office Of The Narcotics Control Board Thailand* (ONCB Thailand) dalam Menanggulangi

---

<sup>18</sup> Sarah Tabitha, Nurmasari Situmeang, dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, "Kerja sama Indonesia - Thailand dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug-Free ASEAN 2015", *Frequency of International Relations*, Vol.4 No. 1 (2022).

Penyeludupan Narkotika di Indonesia (2016-2019)" karya Chrisindo Reformanda Tamalagi dari Universitas Pelita Harapan.<sup>19</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai kerja sama Indonesia dan Thailand dalam mengatasi penyeludupan narkotika di Indonesia yang telah disepakati berdasarkan penandatanganan MoU pada 8 Desember 2016 dalam bidang pertukaran informasi dan koordinasi. Hasil tulisan tersebut memaparkan bahwa kerja sama kedua negara sudah diimplementasikan dengan terarah dan sejalan berdasarkan MoU yang disepakati bersama. Persamaan antara penelitian tersebut dengan tulisan yang akan dikaji peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai kerja sama yang terbentuk antara Indonesia dan Thailand dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. Namun terdapat sisi perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada upaya dalam mengatasi penyeludupan narkotika, sedangkan pada penelitian kali ini akan lebih memfokuskan untuk menganalisis upaya kerja sama dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika melalui program Pembangunan Alternatif antara Indonesia dan Thailand yang diimplementasikan oleh BNN RI.

Kategori kedua, penelitian terdahulu terkait pelaksanaan program Pembangunan Alternatif di Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Suci Guritno dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam Menjalankan Program *"Alternative Development"* United

---

<sup>19</sup> Chrisindo Reformanda Tamalagi, "Kerja Sama Bilateral Badan Narkotika Republik Indonesia (BNN RI) dengan Office Of The Narcotics Control Board Thailand (ONCB Thailand)", (Skripsi, Universitas Pelita Harapan), 2020.

*Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia pada Tahun 2019-2022*".<sup>20</sup> Pada penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan peran BNN RI dalam melaksanakan program *Alternative Development* yang menerapkan indikator-indikator *Alternative Development* oleh UNODC. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa peran BNN RI dalam melaksanakan program *Alternative Development* di Aceh dilakukan melalui beberapa program seperti *agricultural development, community development, environmental protection, basic infrastructure, education, gender equality, improve markets, health, dan security role of law*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama berfokus dalam membahas program *Alternative Development* di Indonesia, sedangkan perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan, jika penelitian tersebut menggunakan peran namu pada penelitian ini akan menggunakan konsep implementasi sebagai bahan kajian.

Tesis dengan judul "Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganga di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD" karya Agung Suseno dari Universitas Indonesia.<sup>21</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan program *alternative development* di Mukim Lamteuba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan program Pembangunan Alternatif sebagai kegiatan alih fungsi lahan tanaman ilegal jenis ganja yang

---

<sup>20</sup> Wulan Suci Guritno, "Peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam Menjalankan Program "*Alternative Development*" *United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia pada Tahun 2019-2022*", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>21</sup> Agung Suseno, "Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD", (Tesis, Universitas Indonesia, 2012).

diterapkan di Mukim Lamteuba sepenuhnya belum terlaksana sesuai harapan, hal tersebut dilihat dari sub variabel *assess context, describe the program, engage stakeholders, gather reconnaissance, dan focus the evaluation*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji kali ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program *alternative developmant* di wilayah Aceh. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian kali ini yaitu dimana penelitian kali ini akan menyoroti pelaksanaan program pembangunan alternatif melalui sisi kerja sama bilateral yang dijalin dengan Thailand guna bertukar pengalaman dalam mewujudkan keberhasilan program tersebut.

Kategori ketiga, penelitian terdahulu terkait kebijakan Indonesia dalam mengatasi *drug trafficking*.

Artikel jurnal dengan judul "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Integrasi Kerjasama di ASEAN untuk Menyikapi Permasalahan Peredaran Narkoba" karya Nur Inna Alfiyah dan Lulus Sugeng Triandika dari Universitas Wiraraja Sumenep.<sup>22</sup> Dalam tulisan tersebut bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam integrasi kerjasama di ASEAN dalam menangani permasalahan narkotika dan *drug trafficking*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan politik luar negeri indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba serta membangun integrasi kerja sama di ASEAN bisa dilihat melalui keseriusan pemerintah dalam meningkatkan anggaran guna

---

<sup>22</sup> Nur Inna Alfiyah dan Lulus Sugeng Triandika, "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Integrasi Kerjasama di ASEAN untuk Menyikapi Permasalahan Peredaran Narkoba", *Journal Global and Policy*, Vol. 6 No. 2, (2018).



Joko Widodo dalam memberantas masalah narkoba merujuk pada rencana kerja ASEAN *Drug Free Area*. Berdasarkan pada ASEAN *Drug Free Area*, aspek *supply* dan *demand reduction* menjadi fokus penting dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Melalui aspek tersebut, lalu rencana kerja ASEAN *Drug Free Area* terbagi menjadi enam indikator, yaitu edukasi preventif, pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum, pembangunan alternatif, penelitian, serta hukum dan kerjasama. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba. Namun dalam penelitian tersebut berfokus pada rencana kerja ASEAN *Drug Free Area*, sedangkan pada penelitian kali ini akan berfokus pada program pembangunan alternatif yang juga disinggung sekilas di penelitian tersebut sehingga dalam penelitian kali ini fokus mengenai program pembangunan alternatif tersebut akan lebih diperdalam namun dengan pembahasan melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand sebagai *best practice* dalam program Pembangunan Alternatif.

Kategori keempat, penelitian terdahulu terkait upaya dalam pencegahan permasalahan narkoba.

Artikel jurnal yang berjudul "Upaya UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di

Indonesia" karya Rizki Sari Fadillah dari Universitas Riau.<sup>24</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis langkah UNODC dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia langkah yang dilakukan UNODC dengan mengimplementasikan program *alternative development*, peluncuran global SMART program, *country programme* Indonesia, serta *pilot project*. Persamaan penelitian tersebut dengan tulisan yang akan dikaji peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai upaya dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan dimana pada penelitian kali ini akan lebih berfokus pada upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba terutama jenis ganja melalui kerja sama Indonesia dan Thailand yang diimplementasikan dalam program pembangunan alternatif.

Skripsi dengan judul "Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Australia dalam Peredaran Narkotika Era Presiden Joko Widodo Periode I (2014-2019)" karya Bernadet Yosanda Amelia dari UPN Veteran Yogyakarta.<sup>25</sup> Hasil dari tulisan tersebut memaparkan bahwa Indonesia dan Australia melaksanakan berbagai bentuk kerja sama, salah satunya di bidang keamanan yang diimplementasikan dalam operasi dan pelatihan bersama. Walaupun kerja sama ini baru dilaksanakan pada era Presiden Joko Widodo yakni pada bulan November 2018, tapi telah

---

<sup>24</sup> Rizki Sari Fadillah, "Upaya UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime) dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia", *JOM Fisip*, Vol. 2 No. 2, (2015).

<sup>25</sup> Bernadet Yosanda Amelia, "Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Australia dalam Peredaran Narkotika Era Presiden Joko Widodo Periode (2014-2019)", (Skripsi, UPN Veteran Yogyakarta), 2019.

memberikan hasil yang baik, seperti halnya telah terjadi banyak peningkatan penjarangan kasus narkoba di wilayah Indonesia dan Australia. Persamaan antara tulisan tersebut dengan tulisan yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai upaya pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba melalui implementasi kerja sama bilateral yang terjalin oleh dua negara. Namun pembeda terletak pada rekan kerja sama negara yang akan diteliti, dimana pada penelitian kali ini akan berfokus pada implementasi dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand dalam mengatasi peredaran narkoba dalam melaksanakan program *Alternative Development* oleh BNN RI.

Skripsi dengan judul "Implementasi Kerja Sama Penanganan Kasus Penyeludupan Narkoba Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017" karya Fathimah Ma'rufah dari UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>26</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan menganalisis bagaimana pelaksanaan kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam upaya menekan isu penyelundupan narkoba di wilayah Jawa Timur pada tahun 2015 hingga 2017. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa kerja sama antar kedua belah pihak telah disepakati berdasarkan MoU antara POLRI dan PDRM yang tercantum dalam Pergub Jawa Timur No. 74 Tahun 2012 mengenai strategi P4GN. Persamaan dari penelitian tersebut dengan tulisan yang akan dikaji kali ini yaitu sama-sama membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan

---

<sup>26</sup> Fathimah Ma'rufah, "Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyeludupan Narkoba Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

narkotika dengan menjalin hubungan kerjasama internasional. Namun yang menjadi pembeda yaitu pada penelitian kali ini lebih berfokus pada implementasi kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Thailand dalam melaksanakan program *Alternative Development* guna mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia oleh BNN RI.

#### **F. Argumentasi Utama**

Peneliti memiliki dugaan sementara bahwa implementasi kerja sama pengawasan penyalahgunaan narkotika antara Indonesia dan Thailand dalam adopsi praktik terbaik Pembangunan Alternatif oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diimplementasikan dengan cara penguatan kapasitas kelembagaan, pertukaran informasi, dan kunjungan kerja terkait pelaksanaan program Pembangunan Alternatif di Indonesia.

#### **G. Sistematika Penulisan Laporan**

Pada bab satu berisi konsep dari penelitian yaitu mencakup latar belakang masalah yang sedang diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, dan sistematika penulisan laporan.

Bab dua berisi tentang landasan konseptual terkait konsep kerja sama bilateral, konsep implementasi, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB), serta program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*).

Bab ketiga berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan tingkat analisis, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat memaparkan hasil yang telah didapatkan baik itu melalui data primer maupun data sekunder dalam menyajikan topik yang sedang diteliti. Dimana dalam bab ini akan membahas mengenai permasalahan narkoba di Indonesia, latar belakang kerja sama antara BNN dan ONCB, desain program Pembangunan Alternatif di Indonesia, serta implementasi kerja sama dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, kunjungan kerja, alih fungsi lahan dan profesi dalam *Grand Design Alternative Development (GDAD)*, dan *bilateral meeting* antara BNN dan ONCB.

Bab kelima berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dikaji serta saran yang ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam fokus penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

Pada penelitian ini, landasan konseptual yang digunakan yaitu konsep kerja sama bilateral, konsep implementasi, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB), dan program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*). Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, dan lembaga pemerintahan sehingga hal tersebut dapat mempermudah para pembaca agar sesuai dengan logika berpikir peneliti.

#### A. Konsep Kerja Sama Bilateral

Kerja sama merupakan suatu hubungan yang terjalin guna mencapai tujuan bersama. Salah satu bentuk kerja sama yaitu kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral diartikan sebagai kerja sama antar dua negara yang bertujuan guna mencukupi kepentingan kedua negara sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Hubungan kerja sama juga tidak lepas dari adanya suatu penandatanganan nota kesepahaman, pertukaran duta besar antar negara, dan kunjungan kenegaraan. Bentuk-bentuk dari kerja sama antara lain seperti kerja sama bidang politik, pendidikan, ekonomi, pertahanan, dan budaya.

Kerja sama bilateral adalah bentuk hubungan antar dua pemerintahan yang memberikan pengaruh sehingga tercipta suatu hubungan timbal balik. Terdapat pola dalam kerja sama bilateral, yaitu:

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.



2. Dalam kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh kepentingan tiap-tiap negara yang tergabung, tetapi juga oleh institusi internasional, sebab institusi internasional seringkali tidak hanya mengelola perbedaan kepentingan anggotanya, namun juga kepentingan pribadinya.<sup>30</sup>

Dalam konteks kerja sama bilateral ini seperti halnya kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Thailand. Keduanya menjalin kerja sama atas dasar permasalahan internal masing-masing negara yakni melakukan pengawasan, pencegahan, dan menekan permasalahan narkoba di masing-masing negara sehingga keduanya menyepakati hubungan bilateral dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif yang diimplementasikan di Indonesia. Mengingat bahwa Thailand sebagai negara yang terbukti sukses dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di negaranya dengan bersinergitas dalam kegiatan alih fungsi lahan opium ke komoditas yang lebih produktif. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan Indonesia menggandeng Thailand dalam mengimplementasikan program Pembangunan Alternatif tersebut.

## **B. Konsep Implementasi**

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan. Implementasi juga didefinisikan sebagai penerapan kegiatan yang telah disahkan oleh suatu pihak untuk mencapai suatu tujuan serta bersifat terorganisir dari agen-agen eksekutif. Mengacu pada pendapat menurut Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan program yang sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 6.

langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan guna mencapai kepentingan atau tujuan.<sup>31</sup>

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agus Subianto, terdapat indikator-indikator pada proses implementasi, antara lain memiliki suatu kebijakan atau program yang diterapkan, adanya suatu target atau kelompok masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program dan dipastikan sebagai penerima manfaat dari program, dan adanya indikator implementor (pelaksana) program baik meliputi suatu organisasi maupun individual. Dalam proses implementasi kebijakan meliputi pelaksanaan aktivitas yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan serta berkesinambungan dengan upaya meneruskan kebijakan yang telah ditentukan tersebut ke dalam bentuk tindakan, dibentuknya suatu badan atau staf organisasi yang memiliki tugas memberikan manfaat atau servis kepada sasaran kebijakan serta mengordinasikan terkait SDA dan SDM yang diperlukan dalam tercapainya tujuan.<sup>32</sup>

Berdasarkan indikator-indikator di atas, pada penelitian ini kebijakan atau program yang dijalankan yaitu program Pembangunan Alternatif yang diimplementasikan dalam lingkup nasional oleh implementor yaitu BNN RI. Dalam pengimplementasian program tersebut di wilayah Aceh, BNN melakukan kerja sama dengan ONCB Thailand yang telah terbukti sukses dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di wilayah Doi Tung dengan tujuan untuk mengadopsi pengalaman sukses tersebut. Kerja sama tersebut telah disepakati dengan ditandatanganinya MoU yang

---

<sup>31</sup> Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (USA : Scott Foresman and Company), 1983, hal 25.

<sup>32</sup> Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, (Surabaya: Brilliant), 2020, hal. 55.

berkesinambungan oleh kedua instansi. Namun di Indonesia, BNN mengimplementasikan program tersebut berdasarkan kondisi permasalahan narkoba di negaranya sehingga dibentuklah panduan pelaksanaan program Pembangunan Alternatif yang disebut *Grand Design Alternative Development* (GDAD) yang berfokus melakukan kegiatan alih fungsi lahan ganja ke komoditas unggulan seperti jagung dan alih profesi dari petani ganja ke petani jagung. Target dalam pelaksanaan program ini yaitu wilayah Provinsi Aceh yang meliputi Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues dengan kondisi kerawanan akan narkoba serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang terbilang masih rendah karena masih tingginya angka kemiskinan disana. Oleh sebab itu, dengan dilaksanakannya program Pembangunan Alternatif ini diharapkan dapat mengurangi angka permasalahan penyalahgunaan narkoba serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Memorandum of Understanding (MoU) antara BNN dan ONCB**

Dalam sebuah hubungan kerjasama biasanya tidak terlepas pada suatu *agreement* yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. *Agreement* tersebut sebagai dasar rujukan atas kerjasama yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan secara hukum berdasarkan kepentingan masing-masing negara. Seperti halnya kerjasama yang terjalin antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB) dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif sebagai upaya mengatasi permasalahan narkoba yang tertuang dalam suatu MoU antara Badan



ONCB, Mr. Sithisak Watjanarat selaku Direktur Biro Pemberantasan Narkotika, serta pejabat terkait dari Biro Urusan Luar Negeri ONCB.<sup>34</sup> Dengan disepakatinya nota kesepahaman tersebut, secara tidak langsung telah meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pengendalian narkoba antara kedua negara menjadi lebih konkrit baik dalam pendekatan *demand* maupun *supply reduction*.

Terdapat poin-poin yang disepakati dalam Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dan diharapkan mampu menekan kasus penyelundupan narkotika terkhusus di Indonesia, poin kerjasama tersebut antara lain:

1. Langkah-langkah pengurangan pasokan dan permintaan narkotika dalam upaya memerangi narkotika, psikotropika, prekursor, serta bahan kimianya;
2. Bertukar pengalaman dan informasi mengenai penegakkan sistem hukum yang efektif mencakup tata cara penggeledahan serta penyitaan narkoba yang disembunyikan, modus operandi oleh pengedar narkoba, jaringan narkoba dan pelaku atau terduga atau ditahan karena kasus narkoba, produksi obat-obatan terlarang, dan jalur penyeludupan;
3. Pertukaran bidang pengetahuan dan pengalaman yang terkait teknologi modern dalam mendeteksi obat-obatan terlarang, narkoba, profil obat dan hasil tes, narkotika kategori baru beserta sampelnya;

---

<sup>34</sup> ONCB, "The Office of the Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) has signed the Memorandum of Understanding on Drug control with the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia (BNN)", [https://www.oncb.go.th/en\\_oncb/\\_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=57&newslist=board\\_en&newslistdisplayname=board\\_en&newssite=http://www.oncb.go.th/en\\_oncb/&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate&comment=yes](https://www.oncb.go.th/en_oncb/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=57&newslist=board_en&newslistdisplayname=board_en&newssite=http://www.oncb.go.th/en_oncb/&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate&comment=yes), diakses 2 April 2023.

4. Pertukaran pengalaman dan informasi terkait praktik legislatif dan yudisial guna pengendalian narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba, program pendidikan efektif beserta kampanye anti narkoba, perawatan dan rehabilitasi yang mencakup lingkungan pemasyarakatan;
5. Pertukaran praktik terbaik tentang Pembangunan Alternatif;
6. Peningkatan kapasitas, pelatihan serta kunjungan para ahli dari para pihak berdasarkan aturan di bawah Nota Kesepahaman;
7. Bidang-bidang kerjasama lainnya yang menjadi perhatian sesuai dengan aturan berdasarkan MoU ini berdasarkan tiap kasus sebagaimana disepakati.<sup>35</sup>

Berdasarkan pada MoU yang telah disepakati tersebut, penelitian ini akan berfokus pada poin kelima dalam kerja sama yang terjalin yakni dalam bidang pertukaran praktik terbaik Pembangunan Alternatif guna melakukan pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba. Indonesia dan Thailand sama-sama mengimplementasikan program Pembangunan Alternatif di negaranya dengan penerapan yang berbeda berdasarkan dengan kondisi permasalahan narkoba masing-masing negara. Di Thailand, program Pembangunan Alternatif dijalankan berdasarkan panduan dari *Doi Tung Development Project*, sedangkan di Indonesia program tersebut diimplementasikan berdasarkan *road map* yaitu *Grand Design Alternative Development* (GDAD). Tetapi keduanya tetap berpedoman kerja pada

---

<sup>35</sup> “Memorandum Saling Pengertian Antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Narkotika, Zat Psikotropika, Prekursor dan Bahan Kimianya, dan Penyalahgunaan Narkotika”, 2016.



- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Undang Proklamasi Partai Revolusioner No. 216 tanggal 19 September 1972 (No. 214). ONCB telah beberapa kali direorganisasi, saat ini ONCB berada di bawah Kementerian Kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand memiliki misi yaitu:

- a. Merumuskan dan menyesuaikan strategi pengendalian narkotika nasional agar dapat dilaksanakan secara tepat dan berkesinambungan serta memperhatikan perkembangan situasi narkoba saat ini;
- b. Menyelenggarakan upaya pengendalian narkotika secara terpadu sebagaimana tertuang dalam strategi pengendalian narkotika nasional;
- c. Mengawasi dan mengarahkan penegakan hukum narkotika dan undang-undang lain yang terkait;
- d. Memantau, memeriksa dan mencermati penyebaran narkoba.<sup>39</sup>

ONCB Thailand selaku aktor yang memiliki wewenang melakukan pencegahan terhadap masalah narkotika di Thailand. ONCB Thailand telah terbukti berhasil dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di negaranya dengan bantuan dari Yayasan Mae Fah Luang *Foundation*. BNN RI sebagai lembaga yang juga berfokus pada permasalahan narkotika menggandeng ONCB Thailand untuk mendapatkan berbagai pengalaman daam pelaksanaan program Pembangunan Alternatif di Thailand juga sebagai penjematan hubungan antara Indonesia dan Yayasan Mae Fah Luang

---

<sup>39</sup> Office of the Narcotics Control Board (ONCB), diakses 15 November 2022, [https://www.oncb.go.th/EN\\_ONCB/Pages/visionANDmission.aspx](https://www.oncb.go.th/EN_ONCB/Pages/visionANDmission.aspx).



Sejak diterbitkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, peran aktif seluruh jajaran masyarakat menjadi titik penting agar mampu menciptakan kawasan bebas narkoba serta menyelenggarakan Pembangunan Alternatif sebagai langkah menciptakan solusi berdasarlan pendekatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) bersifat humanis. Sasaran program Pembangunan Alternatif tersebut yaitu masyarakat desa yang teridentifikasi sedang menanam ganja dan juga untuk masyarakat kota melalui *Community Development*.<sup>42</sup>

Pada penelitian ini, digunakan konsep Pembangunan Alternatif guna membantu mendeskripsikan seperti apa implementasi yang dilakukan oleh BNN RI yang bekerja sama dengan ONCB Thailand dalam menjalankan program tersebut di Indonesia berdasarkan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) yang dibentuk guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>42</sup> Humas BNN, “Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif pada Instansi Pemerintah, Lsm dan Kalangan Dunia Usaha”, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, diakses 10 Februari 2023, <https://bnn.go.id/lokakarya-sinergi-program-pemberdayaan-alternatif-pada-instansi-pemerintah-lsm-dan-kalangan-dunia-usaha-2/>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk memecahkan isu pada suatu penelitian dengan berupa narasi serta melalui dokumentasi, tanya jawab (wawancara), maupun penggalian dokumen. Melihat definisi di atas, penelitian dapat dilakukan dengan mengacu pada fenomena sosial yang terjadi di lapangan, lalu dapat dilakukan pengamatan dan analisis sehingga menghasilkan jawaban sementara dari hasil yang telah diamati tersebut.

Sedangkan pada jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Maleong, penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara sistematis dan berupa kata-kata tertulis.<sup>43</sup> Peneliti memakai pendekatan studi kasus sebab peneliti berkeinginan untuk mendapatkan informasi dari masalah berkaitan dengan penelitian ini, dimana kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk narasi agar dapat dipahami dengan mudah mengenai studi kasus yang sedang dikaji. Langkah yang diterapkan dengan mendeskripsikan implementasi dari kerjasama dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif guna mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).





guna menunjang data penelitian.<sup>48</sup> Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti setelah ditentukannya topik penelitian dan masalah penelitian, kemudian baru terjun guna melakukan pengumpulan data.<sup>49</sup> Dalam melakukan pengumpulan data ataupun mencari sumber data, penulis menggunakan data sekunder seperti pada artikel, jurnal, situs berita *online*, *website*, dan *browser*.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan komunikasi melalui tanya jawab yang dilakukan antar individu guna mendapatkan informasi maupun data yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Dalam wawancara, peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur dimana sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan terkait data yang diperlukan. Narasumber atau informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Dwi Dhini Mandiri selaku Kepala Seksi Kerja Sama Regional dan Analis Kerja Sama Regional Badan Narkotika Nasional RI. Hal tersebut dilakukan peneliti sebab narasumber dianggap telah memenuhi indikator terkait data yang dibutuhkan serta pihak yang paling mengetahui atau memahami mengenai topik pembahasan yang sedang dikaji oleh peneliti sekaligus merupakan bagian dari subjek penelitian.

---

<sup>48</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan 2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 221.

<sup>49</sup> Eka Diah Kartiningrum, "PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR", *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (2015).

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan peneliti yaitu model interaktif oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dari beberapa sumber, seperti melalui dokumentasi dan wawancara yang kemudian dituangkan ke dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen, gambar, dan lainnya. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak BNN RI, serta pengumpulan data dari sumber-sumber seperti dokumen, buku, jurnal, dan *website*.

### 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi merupakan proses pemilihan, seleksi, menyederhanakan, dan pergantian data yang ada pada catatan lapangan, dokumen-dokumen, wawancara ataupun data-data yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah diperoleh tadi bisa diubah melalui proses pemilihan, seleksi, ataupun ringkasan dengan kata-kata sendiri. Berdasarkan pada data yang telah dimiliki, peneliti akan menggunakan data-data yang dianggap penting, sedangkan data yang tidak terlalu penting tidak akan dipergunakan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak BNN RI dan dokumentasi seperti jurnal, situs berita, dokumen-



hasil penelitian dimana kesimpulan sendiri digunakan untuk menjawab fokus penelitian dalam suatu penelitian serta bagian dari sebuah kegiatan penelitian konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan adalah bukti terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>52</sup>

#### **F. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penggalian data melalui dokumentasi fisik yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Perpustakaan Daerah di Tuban yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga No. 10, Latsari, Tuban. Adapun data-data penelitian yang bersifat online diperoleh peneliti melalui penelusuran di berbagai media internet seperti *website*, situs berita *online*, laman *browser*, artikel, dan jurnal. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara bersama pihak terkait yaitu BNN RI. Namun peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung dengan tatap muka, melainkan dilakukan secara *online* melalui aplikasi *whatsapp*. Sedangkan untuk waktu penelitian terhitung mulai bulan November 2022.

#### **G. Tahapan Penelitian**

Di bawah ini merupakan tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Pemilihan Topik, Tema, dan Kasus

Pemilihan topik, tema, dan kasus merupakan tahap awal dari sebuah penelitian. Peneliti memiliki ketertarikan pada topik kejahatan transnasional yaitu narkoba yang kemudian peneliti akan mengkaji

---

<sup>52</sup> Ibid., hal. 9.

mengenai implementasi kerja sama Indonesia melalui BNN RI dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif guna mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia.

## 2. Pembacaan Literatur-literatur

Pada tahap selanjutnya, peneliti mengumpulkan berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas oleh peneliti. Dimana sumber-sumber literatur yang didapatkan berasal dari artikel, jurnal, berita-berita, dan bacaan lainnya yang terkait dengan topik pembahasan yang dilakukan.

## 3. Penyusunan Fokus Penelitian serta Judul Penelitian

Setelah melalui tahap pembacaan berbagai literatur, pada tahap ini peneliti akan merumuskan mengenai permasalahan yang akan dikaji dengan menyusun fokus penelitian. Dalam tahap ini pula peneliti juga melakukan penyusunan judul dari penelitian.

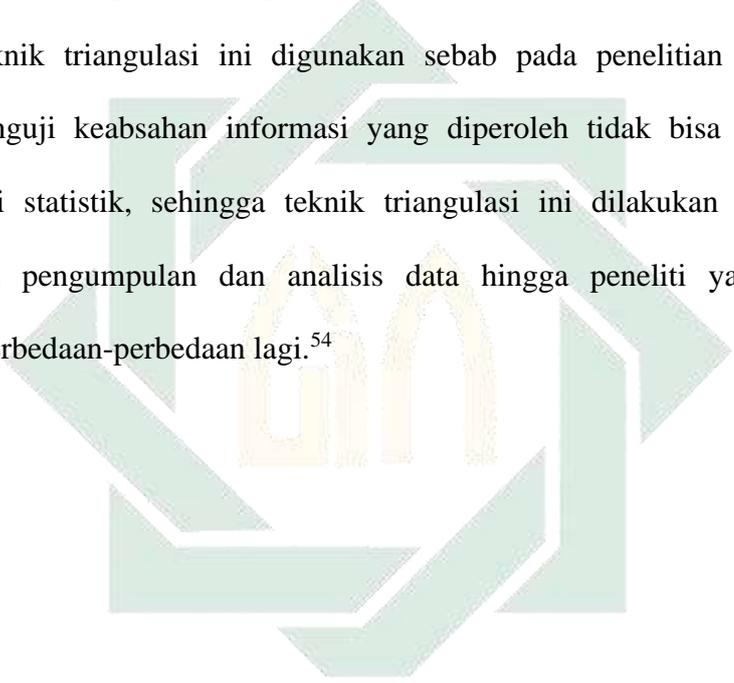
## 4. Mengumpulkan Data Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan dan mengumpulkan data terkait penelitian yang akan dikaji. Hal tersebut dilakukan guna memperkaya data dari berbagai sumber atau data tambahan yang didapat oleh peneliti baik data primer ataupun data sekunder. Selain itu, pada tahapan ini peneliti juga melakukan penggalian data untuk fokus penelitian yang sedang dikaji.



terdahulu, dokumen, situs pemerintah, dan catatan resmi yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti sebagai pembandingan dari data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara. Dengan begitu akan mendapatkan keluasan informasi guna mendapatkan kebenaran.

Teknik triangulasi ini digunakan sebab pada penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh tidak bisa dilakukan dengan uji statistik, sehingga teknik triangulasi ini dilakukan sepanjang melakukan pengumpulan dan analisis data hingga peneliti yakin tidak terdapat perbedaan-perbedaan lagi.<sup>54</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>54</sup> Buhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 205.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Permasalahan Narkotika di Indonesia

Permasalahan narkotika telah menjadi perhatian yang serius diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembahasan terkait darurat narkotika juga menjadi agenda dalam negeri. Presiden RI yaitu Joko Widodo melaksanakan pertemuan khusus guna membahas upaya tanggap darurat dalam mengamati dan mengatasi masalah narkotika dengan mencari sumber permasalahan narkotika di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh kultivasi tanaman ganja yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Hal ini didasari pada survei BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia mengenai studi penyalahgunaan narkotika pada pelajar di tahun 2016 diketahui bahwa narkotika jenis ganja menjadi narkotika yang paling banyak disalahgunakan yaitu mencapai 44,8%.<sup>55</sup>

Pemerintah Indonesia mulai serius dalam menghadapi ancaman permasalahan narkotika, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang bertugas secara khusus untuk mencegah dan memberantas permasalahan narkotika, seperti BNN RI, BNNP, dan BNNK. Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang

---

<sup>55</sup> Humas BNN, "GRAND DESIGN OF ALTERNATIVE DEVELOPMENT (GDAD) 2016-2025 DI PROVINSI ACEH," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017, <https://bnn.go.id/grand-design-of-alternative-development-gdad-2016-2025-di-provinsi-aceh/>, diakses 21 Februari 2023.





Ditemukan pula bahwa Provinsi Aceh menjadi provinsi terbesar ke-6 sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba terbesar yaitu mencapai 1,9% (sekitar 52.190 penduduk). Tak hanya itu, mengacu pada realita berdasarkan data demografi Aceh di tahun 2019 mengungkapkan bahwa Aceh mengalami berbagai permasalahan sosial yang perlu menjadi perhatian, antara lain seperti tingginya tingkat kemiskinan yang mencapai 15,01% (tertinggi di Pulau Sumatra)<sup>59</sup>, tingkat pengangguran mencapai 6,17%<sup>60</sup>, serta pertumbuhan ekonomi yang masih lambat yakni sebesar 4,15%<sup>61</sup>. Melihat realita-realita tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi indikator pemicu kawasan yang rawan narkoba, yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga berdampak pada sulitnya akses pendidikan yang menyebabkan putus sekolah juga pada akhirnya berpengaruh pada maraknya pengangguran.

Oleh sebab itu, sejak 2006 pemerintah mengenakan program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) sebagai upaya mengatasi permasalahan narkoba dan menjadi inovasi percepatan pembangunan di wilayah-wilayah di Indonesia dengan menggandeng berbagai pihak terkait. Program Pembangunan Alternatif terus digiatkan sampai saat ini serta di desain ke dalam GDAD 2016-2025 sebagai program yang bertujuan untuk

---

<sup>59</sup> Agus Setyadi, "Ini Penyebab Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Bertambah Menurut Pemprov," *detikSumut*, 2023.

<sup>60</sup> BPS Provinsi Aceh, "Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2017-2019," Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh, diakses 21 Februari 2023, <https://aceh.bps.go.id/indicator/6/206/2/tingkat-pengangguran-terbuka.html>, diakses 21 Februari 2023.

<sup>61</sup> BPS Provinsi Aceh, "Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2019," Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh, 2020, <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/566/pertumbuhan-ekonomi-aceh-tahun-2019.html>.

mengurangi pengaruh yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan pendekatan kesejahteraan dan berkelanjutan.<sup>62</sup>

## **B. Latar Belakang Kerja Sama antara BNN RI dan ONCB Thailand**

Dalam mengatasi permasalahan, memenuhi kebutuhan, dan kepentingan nasionalnya, sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri melainkan membutuhkan kerja sama internasional baik secara bilateral maupun multilateral yang bertujuan pemenuhan kebutuhan dan menyongsong kepentingan negaranya. Bentuk-bentuk kerja sama internasional ini seperti kerja sama di bidang pertahanan, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang mana kerja sama tersebut berpegang pada politik luar negara masing-masing.<sup>63</sup> Persamaan kepentingan nasional dan tujuan suatu negara menjadi pendorong untuk melakukan suatu kerja sama.

Seperti halnya kerja sama yang terjalin antara BNN RI dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB Thailand) dalam program Pembangunan Alternatif sebagai upaya menangani permasalahan narkoba yang bersifat transnasional sehingga membuat keduanya harus bersatu melakukan kerja sama guna mencari solusi dalam permasalahan tersebut agar tidak berimbas kepada negaranya. Kepentingan dari masing-masing itulah yang menjadi salah satu pendorong yang melatarbelakangi hubungan kerja sama tersebut.

---

<sup>62</sup> BNN RI, *PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI GDAD DI PROVINSI ACEH*, hal. 11-13.

<sup>63</sup> Annaas Maulana Bagaskara, "Kerja sama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia," *Journal of International Relations*, Vol. 4 No. 3, (2018).

Hal lain yang juga melatarbelakangi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand juga karena fakta bahwa keduanya adalah negara yang berada satu kawasan yaitu Asia Tenggara dan sama-sama tergabung dalam forum ASEAN yaitu ASOD yang berfokus pada masalah kejahatan transnasional yaitu narkoba, tetapi ruang kerja ASOD sendiri terlalu luas sehingga Indonesia dan Thailand menjalin hubungan kerja sama untuk fokus memenuhi kepentingan nasional keduanya.

Tak hanya itu, alasan bahwa banyaknya sindikat narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari kawasan *Golden Triangle* (kawasan segitiga emas yang terdiri dari tiga negara, yakni Thailand, Myanmar, dan Laos) juga menjadi kepentingan yang melatarbelakangi kerja sama tersebut.<sup>64</sup> Dengan demikian keduanya dapat saling bertukar informasi terkait penyeludupan narkoba yang berasal dari kawasan *Golden Triangle* maupun kawasan lain.

Indonesia menjalin kerja sama bersama Thailand sebagai salah satu negara di kawasan *Golden Triangle* juga menjadi pemasok narkoba terbesar di Indonesia sehingga Indonesia memandang perlu adanya kerja sama khususnya dalam bidang pemberantasan narkoba untuk mendapatkan informasi maupun melakukan pertukaran informasi terkait narkoba yang berasal dari kawasan *Golden Triangle* agar bisa dicegah sebelum masuk ke Indonesia.

Selain itu, Thailand juga mempunyai *Doi Tung Development Project* yang berhasil mengubah ladang opium menjadi lahan yang memiliki nilai jual

---

<sup>64</sup> Aulia Srifauzi, Nurul Azhimi, dan M. Ikrar Mahendra Lubis, "Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean," *Jurnal PIR : Power in International Relations*, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 32.

yang tinggi seperti untuk pertanian kacang macadamia dan kopi, pembuatan *handicraft*, dan pariwisata. Indonesia saat ini masih memiliki lahan ganja di Aceh sehingga dengan keberhasilan yang dimiliki oleh Thailand, Indonesia berharap dapat mempelajari hal tersebut.<sup>65</sup>

Fakta bahwa jalur penyeludupan narkotika ke Indonesia juga dominan melalui laut, hal ini tentunya melewati kawasan *Golden Triangle* sehingga perlu melibatkan Thailand untuk berbagi informasi untuk mengetahui pola penyeludupan narkotika. Kerja sama BNN RI dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand berkaitan dengan upaya P4GN masing-masing negara, seperti halnya Indonesia yang membutuhkan pelatihan untuk melaksanakan keberhasilan program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) untuk mengurangi permasalahan penyalahgunaan narkotika terutama jenis ganja. Sedangkan Thailand juga membutuhkan informasi dan pelatihan di bidang rehabilitasi serta pelatihan ahli dalam bidang pemberantasan narkotika.

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa keduanya sama-sama membutuhkan dalam mengatasi permasalahan narkotika sebab didasari atas realita bahwa dalam menangani penyeludupan narkotika dibutuhkan kerja sama dengan negara lain mengingat bahwa kejahatan ini bersifat transnasional. Oleh sebab itu, Indonesia melalui BNN RI dan ONCB Thailand menjalin kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand Tentang Kerja sama dalam Pengawasan Narkotika, Zat Psikotropika, Prekursor

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dwi Dhini Mandiri, Selaku Kepala Seksi Kerja sama Regional dan Analis Kerja sama Regional BNN RI, Online, pada tanggal 28 April 2023.





*Development Programme* (ADP) yaitu langkah mengubah tanaman narkotika agar beralih ke tanaman legal melalui kegiatan alih fungsi lahan maupun profesi. Sementara *Sustainable Alternative Livelihood Development* (SALD) yaitu tahap yang bertujuan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat melalui pertanian maupun agrowisata.

GDAD menjadikan kedua tahap ADP dan SALD tersebut ke dalam satu lingkup program yang akan berjalan dalam masa 10 tahun. ADP dilaksanakan selama lima tahun (2016-2020) yang berfokus pada pembangunan sosial, keamanan, dan pelestarian lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan SALD (2021-2025), pada tahap ini masyarakat sudah siap dalam melakukan pengembangan keterampilan guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan pendekatan.

Seperti yang diketahui bahwa permasalahan narkotika menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Badan Dunia membentuk lima rekomendasi dalam upaya menangani permasalahan narkotika yaitu pembangunan sosial dan budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban, pelestarian alam, serta kemitraan. Namun terkhusus pada keadaan Indonesia, perlu ditambahkan agrowisata dan ketahanan pangan.<sup>71</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing rekomendasi tersebut.

1. Pembangunan sosial dan budaya

Salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan yaitu membangun karakter manusia, peningkatan status

---

<sup>71</sup> BNN RI, *Grand Design Alternative Development*, hal. 26.

sosial serta status budaya sebab manusia adalah subjek dan objek dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya P4GN, sumber daya manusia (SDM) menjadi potensi yang harus selalu dioptimalkan agar mampu menggerakkan masyarakat sebab sasaran lainnya dalam program ini yaitu mengubah masyarakat yang secara geografis dan sosial termarginalkan dari dunia luar karena masalah penyalahgunaan narkoba serta membangun karakter masyarakat yang unggul, sehat, taat pada hukum, cinta alam, terbuka akan perubahan hal baik, serta menjaga ketertiban dan keamanan.

## 2. Pengembangan ekonomi

Dalam program pembangunan alternatif, ekonomi adalah kunci dari keberhasilan sebab masalah ketertinggalan, kemiskinan, dan pengangguran dapat teratasi dengan perkembangan ekonomi melalui pengoptimalan SDA dan SDM. Melalui pembangunan ekonomi, wilayah yang mulanya mengalami ketertinggalan dapat kembali produktif sehingga mampu menjadikan pola ekonomi masyarakat yang lebih kompleks, dari yang mulanya hanya pada sektor pertanian kini bisa berkembang ke non-pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan begitu, kegiatan tersebut mampu menjadi solusi yang alternatif untuk mengalihfungsikan lahan ganja menjadi tanaman yang bermutu dan produktif serta mengubah profesi petani ganja menjadi petani yang menanam tanaman unggul. Sehingga hal tersebut mampu menjadikan citra kawasan yang hasil produknya diunggulkan

dan dinantikan. Selain itu, pengembangan ekonomi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan usaha seperti agroindustri dan agrowisata.<sup>72</sup>

### 3. Keamanan dan ketertiban

Dengan terciptanya keamanan dan ketertiban, program Pembangunan Alternatif dapat terlaksana secara aman dan terbebas dari tekanan maupun intervensi kepentingan. Dalam Pembangunan Alternatif, keamanan dan ketertiban menjadi hal penting yang perlu dioptimalkan yang bertujuan menyadarkan masyarakat untuk terus melakukan operasi pemusnahan tanaman ganja dan memantau daerah rawan kultivasi tanaman narkotika agar tercipta lingkungan yang bersih dari narkotika. Mengacu pada keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan, keamanan dan ketertiban perlu didorong oleh pembangunan kesadaran seluruh masyarakat akan norma dan dampak narkotika dimana hal tersebut merupakan salah satu kunci dalam menunjang keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

### 4. Pelestarian alam

Melihat bahwa banyaknya kawasan hutan yang dijadikan sebagai kultivasi tanaman ganja, maka memelihara dan menjaga kelestarian alam sangat penting mengingat pula bahwa hutan menjadi sumber keberlangsungan hidup manusia. Bercermin dari keberhasilan program Pembangunan Alternatif di beberapa negara, lingkungan hutan

---

<sup>72</sup> Ibid., hal. 27.

yang menjadi penopang hidup masyarakat tersebut juga menjadi kunci keberhasilan Pembangunan Alternatif yang patut dijaga oleh seluruh elemen masyarakat serta tidak merusaknya dengan melalui kegiatan penanaman ganja maupun *illegal logging*.<sup>73</sup>

#### 5. Ketahanan pangan

Program Pembangunan Alternatif juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Seperti yang diketahui bahwa ketahanan pangan menjadi topik yang penting di Indonesia sebab pasokan sumber pangan di suatu daerah masih bergantung pada negara lain. Ketahanan pangan dalam Pembangunan Alternatif juga menjadi titik kesuksesan dalam mencapai target lainnya, misalnya ketahanan ekonomi, energi, dan sebagainya hingga mampu mewujudkan bangsa berintegrasi serta jauh dari tindakan kejahatan. Oleh sebab itu, dilakukan peningkatan produk unggulan daerah agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar serta mampu meningkatkan usaha perdagangan.

#### 6. Pengembangan agrowisata

Pengembangan agrowisata juga menjadi tujuan dari Pembangunan Alternatif yang diharapkan mampu mengangkat sektor wisata di daerah sehingga dapat dikenal luas oleh dunia. Bercermin dari keberhasilan negara-negara dalam mewujudkan program pembangunan alternatif, agrowisata mempunyai daya tarik yang mampu memperbaiki

---

<sup>73</sup> Ibid., hal. 28.



mencakup tokoh agama dan tokoh adat di Aceh. Ketiga, melangsungkan dialog serta membentuk sinergitas bersama satuan kerja pemerintah Aceh. Keempat, melaksanakan persiapan serta penyusunan dengan mengumpulkan data-data. Kelima, menyusun program kerja, kegiatan, dan anggaran dana sesuai dengan Rencana Aksi skala Nasional GDAD 2017.

b. Periode I di Tahun 2017

Tahapan yang dilakukan pada tahun ini yaitu melaksanakan pemetaan, konsolidasi beserta koordinasi. Pada tahap tersebut diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu pertama, melaksanakan koordinasi, konsolidasi, harmonisasi untuk menerbitkan Perpres maupun Instruksi Presiden tentang GDAD 2016-2025. Kedua, memetakan kawasan lahan ganja, mengidentifikasi SDM dan SDA serta melakukan cipta kondisi di kawasan yang dijadikan *pilot project* Pembangunan Alternatif. Ketiga, melaksanakan pengaturan dan penyelarasan program serta perhitungan dana dalam mengimplementasikan GDAD. Keempat, melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kawasan yang dijadikan proyek percontohan Pembangunan Alternatif. Kelima, menyusun program kerja, kegiatan, serta anggaran dana sesuai dengan rencana aksi GDAD 2018.

c. Periode I di Tahun 2018

Pada tahun ini dilakukan tahapan yaitu menyusun program kegiatan, anggaran dan perbaikan infrastuktur. Pada tahap tersebut



melakukan monitoring dan mengevaluasi *Grand Design Alternative Development* tahun 2019 serta menyusun program-program, kegiatan, dan anggaran dana *Grand Design Alternative Development* tahun 2020.

e. Periode II di Tahun 2020

Tahapan yang dilakukan pada tahun ini yaitu pendidikan karakter, pelatihan, pembinaan sadar hukum. Pada tahap tersebut diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu pertama, melakukan pelatihan kepada para petani dalam pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan. Kedua, melakukan pelatihan kepada para petani dalam mendayagunakan teknologi yang efisien dan mengemas komoditas pertanian yang telah diolah, dan hasil peternakan. Ketiga, melakukan penataran kepada para petani dalam memanfaatkan energi terbarukan, industri bidang pertanian serta ekonomi kreatif melalui pendidikan karakter. Keempat, melakukan pemantauan dan mengevaluasi *Grand Design Alternative Development* tahun 2020 serta menyusun program-program, kegiatan, dan anggaran dana *Grand Design Alternative Development* tahun 2021.<sup>77</sup>

f. Periode II di Tahun 2021

Pada tahun ini dilaksanakan tahapan yaitu melakukan bimbingan dalam mengelola suatu usaha. Pada tahap ini dipraktikkan melalui beberapa aktivitas, yakni pertama, melakukan pembinaan kepada para petani dalam pengolahan dan pengelolaan komoditas

---

<sup>77</sup> Ibid., hal. 33-34.

pertanian, perkebunan, dan pengolahan hasil perikanan. Kedua, melakukan pembinaan kepada para petani dalam mendayagunakan teknologi yang berdaya guna serta pengolahan dan pengemasan komoditas hasil dari para petani, peternak, dan nelayan. Ketiga, melakukan penyuluhan kepada para petani agar efektif dalam memanfaatkan energi terbarukan, pupuk organik, budidaya pengolahan tanaman obat, bunga, dan minyak atsiri. Keempat, melakukan monitoring serta mengevaluasi *Grand Design Alternative Development* tahun 2021 beserta menyusun program-program, kegiatan, dan anggaran dana *Grand Design Alternative Development* tahun 2022.

g. Periode II di Tahun 2022

Di tahun ini dilakukan tahapan yaitu pendampingan pada pengemasan dan memasarkan hasil produksi. Pada tahap ini dilaksanakan ke dalam beberapa hal, yaitu pertama, melakukan pembinaan kepada para petani dalam pengemasan, *quality control product*, kewirausahaan, *networking*, pemasaran hasil produksi, permodalan, perkoperasian, dan menjadikan media internet untuk melakukan penjualan secara *online*. Kedua, menggalakkan pendidikan berkarakter melalui kegiatan pelatihan keterampilan serta kebiasaan hidup secara menghindari narkoba. Ketiga, melakukan peninjauan dan serta mengevaluasi *Grand Design Alternative Development* tahun 2022 serta menyusun program-program, kegiatan, dan anggaran dana *Grand Design Alternative Development* tahun 2023.

h. Periode II di Tahun 2023

Pada tahun ini dilakukan tahapan yaitu memonitoring dalam mengembangkan dan menjalin kemitraan. Pada tahap ini diterapkan dengan cara, yaitu pertama, memberikan fasilitas yang memadai kepada para petani dalam menunjang segala aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mulai dari mengolah, mengemas, hingga menjual hasil komoditas. Kedua, memberikan akomodasi kepada para pengrajin dan berbisnis di dunia kuliner. Ketiga, memberikan fasilitas kepada para petani dalam pembinaan kedisiplinan terhadap hukum yang berlaku. Keempat, melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi *Grand Design Alternative Development* tahun 2023 dan menyusun program-program, kegiatan, dan anggaran dana *Grand Design Alternative Development* tahun 2024.<sup>78</sup>

i. Periode II di Tahun 2024

Pada tahun ini dilakukan tahapan yaitu mengembangkan dorongan atau *support* dan aksesibilitas pasar. Pada tahap ini dipraktikkan melalui beberapa tindakan, yaitu pertama, berupaya meningkatkan kerja sama antara para pekerja, BUMN serta perbankan. Kedua, meningkatkan hubungan antara petani dan pelaku di sektor serta bidang ekspor impor. Ketiga, meningkatkan pelatihan kapasitas kemampuan serta gaya hidup terbebas narkoba. Keempat, melakukan peninjauan serta mengevaluasi *Grand Design Alternative Development*

---

<sup>78</sup> Ibid., hal. 34-35.

tahun 2024 dan menyusun program-program, kegiatan, dan anggaran dana *Grand Design Alternative Development* tahun 2025.

j. Periode III di Tahun 2025

Tahapan yang dilakukan pada tahun ini yaitu mengembangkan wilayah guna mengembangkan sektor wisata di daerah pedesaan. Pada tahap ini diaplikasikan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, melakukan pemetaan dan meninjau kapasitas agrowisata di daerah. Kedua, memberikan pembelajaran kepada para petani dalam pengelolaan dan pemasaran ekonomi kreatif. Ketiga, melakukan pembinaan, memfasilitasi dan meningkatkan hubungan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif dan agrowisata. Keempat, mengembangkan agrowisata selaku wadah untuk membentuk personalitas wirausaha. Kelima, meningkatkan sarana sosial dan akses komunikasi beserta informasi dalam rangka menunjang pengenalan wisata. Keenam, melakukan monitoring terhadap *Grand Design Alternative Development* tahun 2025 serta menyusun *Grand Design Alternative Development* kedua yaitu tahun 2026-2035.<sup>79</sup>

Dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di Indonesia, terdapat tiga wilayah di Provinsi Aceh yang dijadikan sebagai *pilot project* program Pembangunan Alternatif. Ketiga wilayah tersebut yaitu Aceh Besar, Bireuen dan Gayo Lues. Pemilihan ketiga wilayah tersebut didasari oleh alasan bahwa ketiganya merupakan wilayah yang banyak ditemukan tanaman

---

<sup>79</sup> Ibid., hal. 35-36.



Akibatnya pada tahun 2008 pemerintah Indonesia melaksanakan program Pembangunan Alternatif sebagai program yang berkelanjutan guna menekan permasalahan narkoba.

Pemerintah Indonesia melalui BNN RI sebagai implementor dalam melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan melaksanakan diskusi bersama pemerintah Thailand terkait strategi skala nasional P4GN yang didampingi oleh Mae Fah Luang *Foundation* selaku NGO yang terbukti telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dan sukses dalam menjalankan program Pembangunan Alternatif. Dalam pelaksanaan strategi P4GN di lingkup nasional, BNN RI menggandeng berbagai lembaga seperti Polri dan Bea Cukai dalam mengimplementasikan strategi tersebut seperti halnya ketika melakukan operasi pemusnahan lahan ganja di Aceh.

Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan program Pembangunan Alternatif juga dilakukan melalui kedatangan tim ahli Doi Tung *Development Project* (DTDP) sebanyak 31 orang dari Thailand yang datang ke Indonesia tepatnya di Aceh sebagai wilayah sasaran dalam pelaksanaan program Pembangunan Alternatif pada tahun 2007, kala itu pemerintah Indonesia ataupun BNN RI masih belum mempunyai kapasitas guna menjalankan program Pembangunan Alternatif di negaranya serta masalah perekonomian, keamanan, dan sosial yang terjadi di Indonesia.<sup>82</sup> Oleh sebab itu, mendatangkan 31 ahli dari Thailand merupakan keputusan yang dianggap tepat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam program. Mengingat juga

---

<sup>82</sup> Agung Suseno, "Evaluasi Perencanaan Program Alternative Development Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD", hal. 70.

bahwa Thailand terbukti sebagai *best practice* dan sukses dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di negaranya. Guna menunjang pelaksanaan program tersebut, BNN RI membentuk suatu kelembagaan dalam program Pembangunan Alternatif yang disebut Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup Direktorat Peran Serta Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif.<sup>83</sup>

Pada mulanya, langkah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan melalui peran dari Mae Fah Luang *Foundation* tidak melewati lingkup pemerintahan, maka dari itu awalnya tidak ada peran serta dari Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB). Tetapi lambat laun ONCB ikut hadir dalam lingkup kerja sama dan menjadi penghubung antara BNN RI dan Mae Fah Luang *Foundation* dalam pelaksanaan program Pembangunan Alternatif. Mae Fah Luang *Foundation* mulai membantu Indonesia dalam program Pembangunan Alternatif di tahun 2008 dengan tujuan untuk menekan penyalahgunaan narkotika terutama jenis ganja di Indonesia terlebih di Provinsi Aceh sebagai pusat penanaman tanaman jenis ini sekaligus sebagai daerah sasaran pelaksanaan program dengan cara berupaya menghapus kemiskinan serta melaksanakan program berkelanjutan yang terealisasi melalui kerja sama antara BNN RI dan ONCB.

Dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di Indonesia oleh 31 ahli dari Thailand mendatangi wilayah Provinsi Aceh sebagai *pilot project* sekaligus sasaran dalam pelaksanaan program Pembangunan Alternatif.

---

<sup>83</sup> Dayamas, “Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat”, BNN RI, <https://bnn.go.id/satuan-kerja/dayamas/>, diakses 3 April 2023.

Kedatangan tim ahli tersebut dengan mengunjungi wilayah Lamteuba dan Desa Maheng. Pemilihan sasaran wilayah tersebut didasari kondisi keduanya yang saat itu kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan sehingga penyakit malaria banyak menyerang masyarakat disana. Fokus utama dalam peningkatan kesehatan dilakukan oleh tim ahli dikarenakan kesehatan merupakan penunjang utama sebelum kemudian memberikan pelatihan kepada masyarakat di Aceh terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Pembangunan Alternatif.

Di wilayah Lamteuba (Seulimeum), program ini diimplementasikan dengan memperkuat sistem kesehatan masyarakat, penyediaan obat-obatan, pencegahan penyakit malaria, menanam jagung hibrida, memperbaiki saluran irigasi, serta mengobati penyakit yang menyerang hewan ternak dengan cara pemberian vaksin pada kambing. Dalam pencegahan penyakit malaria, terbukti bahwa tingkat infeksi penyakit malaria mengalami pengurangan dari yang awalnya 2,17% menjadi 0.07% tanpa korban jiwa dari tahun 2006 sampai 2009. Hal tersebut dilakukan tim ahli dari Thailand karena menurut mereka kesehatan warga adalah hal yang utama agar kemudian bisa membuat perubahan yang mendukung program Pembangunan Alternatif disana.

Sedangkan di kawasan Desa Maheng (Kuta Cot Glie), guna meningkatkan taraf hidup penduduk desa tersebut, Yayasan Mae Fah Luang *Foundation* mendirikan Pusat Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran terkait saluran irigasi, peternakan,

pertanian, dan pentingnya menjaga kebersihan umum.<sup>84</sup> Terdapat banyak pihak-pihak yang tergabung didalamnya seperti staf pemerintahan provinsi hingga pusat, para siswa, mahasiswa, serta berbagai perwakilan dari organisasi-organisasi internasional yaitu PBB dan *World Bank*, hal ini terbukti bahwa sejak berdirinya pusat pembangunan tersebut telah menerima 100 delegasi. Para ahli melakukan pembangunan di bukit gersang bekas konflik untuk dijadikan lahan peternakan dan pertanian, misalnya dibangun saluran irigasi dari atas ke bawah yang kemudian irigasi tersebut akan membentuk suatu kolam yang digunakan sebagai budidaya ikan. Selain itu, juga dikembangkan 500 kambing boer yang telah divaksin serta dibuatkan alat penggilingan padi. Namun hal tersebut sangat disayangkan, ketika para ahli Thailand telah kembali ke negaranya, semua yang telah dibangun tersebut banyak dicuri dan dijarah.

Selain program-program di atas, Yayasan Mae Fah Luang *Foundation* juga membentuk program Prosthesis yang berkolaborasi dengan *Protheses Foundation of HRH the Princess Mother* di Rumah Sakit Zainoel Abidin serta pelatihan kepada masyarakat Aceh untuk memproduksi kaki tiruan agar berguna bagi komban amputasi. Hal ini dibuktikan bahwa program Prosthesis tersebut telah memproduksi 203 kaki buatan untuk masyarakat Aceh yang diamputasi dalam 5 tahun.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage, "Sustainable Alternative Livelihood Development in Aceh", 2021, <https://www.maefahluang.org/en/international-program-06/>, diakses pada 3 April 2023.

<sup>85</sup> *Ibid.*,

Selain melakukan berbagai diskusi dan kunjungan 31 ahli dari Thailand, dalam peningkatan kapasitas kelembagaan oleh BNN RI dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand juga dilakukan sebuah pelatihan bersama. Keduanya pernah mengikuti *International Training of Narcotics Enforcement* pada tanggal 4 sampai dengan 13 November 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh *International Anti Narcotics Center of Excellence* (INARCELL) di Lido Bogor Jawa Barat, tepatnya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dan dibuka secara langsung oleh kepala BNN RI yaitu Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S. H.. Pelatihan tersebut diikuti juga oleh beberapa negara, antara lain Indonesia, Thailand, Kamboja, Saudi Arabia, Papua Nugini, Brunei, Seychelles, dan Timor Leste.<sup>86</sup> Dalam kegiatan pelatihan, para anggota mendapatkan beberapa materi, antara lain *dark web*, *handwriting analysis*, *informan handling*, *extradition*, analisis pencucian uang, *mutual legal assistance*, dan operasi interdiksi terpadu yang membahas mengenai P4GN. Informan dari pelatihan tersebut antara lain BNN, POLRI, UNODC, ABF (*Australian Border Force*), DEA (*Drug Enforcement Administration*), AFP (*Australian Federal Police*), dan NZ Police. Selain itu, para anggota juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan seperti kantor BNN RI, Bea Cukai, dan pelabuhan. Dengan adanya pelatihan tersebut dapat mempererat kerja sama

---

<sup>86</sup> PPSDM, "International Training of Narcotics Enforcement," 2019, <https://ppsdm.bnn.go.id/international-training-of-narcotics-enforcement>, diakses pada 5 Mei 2023.



sprin/3088/IX/KA/HK.05.01/2017/BNN pada 4 September 2017 terkait Kunjungan Kerja Delegasi BNN ke Thailand.<sup>88</sup> Menindaklanjuti surat undangan tersebut, maka pada 10-15 September 2017 BNN selaku implementor sekaligus perwakilan delegasi dari Indonesia melakukan kunjungan ke Thailand yang didukung dengan adanya surat undangan pelaksanaan undangan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan tersebut yaitu agenda praktik lapangan, dimana pihak BNN mendapatkan pengalaman dan belajar dari pengelolaan Pembangunan Alternatif di Doi Tung, Thailand yang nantinya akan diimplementasikan di daerah yang dijadikan target pelaksanaan program tersebut yaitu Provinsi Aceh guna mengurangi permasalahan ganja dan memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat disana. Kawasan Doi Tung sebagai contoh keberhasilan program Pembangunan Alternatif. Kunjungan diawali dengan memenuhi panggilan resmi Bapak Toferry Primanda Soetikno selaku wakil Dubes RI di Thailand, Bapak Toferry memberikan apresiasi atas kedatangan kunjungan kerja yang dilakukan ke *Doi Tung Development Project* (DTDP) tepatnya di Chiangrai yang bertujuan memperoleh informasi dalam pelaksanaan program Pembangunan Alternatif dari Yayasan Mae Fah Luang *Foundation* terkait pemberantasan tanaman kultivasi narkoba serta pengalaman terkait strategi dalam mengubah kawasan yang tertinggal menjadi

---

<sup>88</sup> Raja Arya Anugra Pratama, “Kerja sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) - dengan Office Narcotics Control Board of Thailand (ONCB) dalam Program Alternative Development di Aceh”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021), hal 58.

kawasan yang lebih maju, produktif, terbebas dari narkoba, serta unggul dalam agrowisata dan agrobisnis.<sup>89</sup>

Selanjutnya, pihak BNN juga mengunjungi Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand. Melalui kunjungan tersebut, kerja sama keduanya yang telah terjalin dapat terus berkembang dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB Thailand) bersedia memberikan dukungan dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif serta bersedia menjadi jembatan yang memfasilitasi hubungan antara BNN dan Yayasan Mae Fah Luang dalam pelaksanaan GDAD yang telah dirancang oleh Indonesia. Kemudian BNN juga mengunjungi laboratorium milik Badan Pengawas Kerajaan Thailand yaitu *Command Center* yang mempunyai peralatan *sopischated*.

Kunjungan selanjutnya yaitu dengan mengunjungi ketua dari Mae Fah Luang *Foundation* Mom Rajawongse Disnadda Diskul. Dalam kunjungan tersebut, ketua dari Mae Fah Luang *Foundation* mengatakan bahwa Yayasan Mae Fah Luang pada tahun 2007 memberikan pelatihan kepada tim penggerak kesehatan guna mengobati penyakit malaria di Lamteuba. Kegiatan itu dimulai dengan mendiagnosis, pengobatan, lalu pencegahan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan cukup berhasil sebab terdapat penurunan angka infeksi sebesar kurang dari 0,05%, dimana sekarang Lamteuba menjadi percontohan dalam pengelolaan penyakit malaria dan berbagi pengetahuan ke masyarakat, organisasi serta pemerintah yang ingin mempelajarinya. Mae Fah Luang

---

<sup>89</sup> Ibid., hal. 60.

*Foundation* juga bersedia untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif dengan catatan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan survei, dimana itu bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, serta pemerintah mengetahui bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan sebab pendekatan kemanusiaan dapat mengambil hati masyarakat sehingga program Pembangunan Alternatif dapat terlaksana dengan mudah.<sup>90</sup>

Selain itu, BNN juga diberikan kesempatan untuk mendatangi perusahaan kopi serta perkebunan kacang macadamia yang telah berkembang selama 24 tahun di *Doi Tung Development Project* serta mengamati proses pembibitan sampai pengemasan. Pihak BNN juga diberikan kesempatan untuk mengunjungi berbagai ragam kerajinan seperti tenunan yang dibuat *handmade*, serta kunjungan ke museum yang bernama *Hall of Opium* yang menyajikan informasi terkait penyebaran narkotika jenis opium di dunia, tak terkecuali di kawasan *Golden Triangle*.<sup>91</sup>

Dengan diimplementasikannya kegiatan praktik lapangan ke wilayah Doi Tung seperti yang dijelaskan di atas, tentunya akan banyak pembelajaran yang didapat BNN terkait kunci sukses program Pembangunan Alternatif di Thailand. Oleh sebab itu, diharapkan BNN selaku pelaksana kebijakan beserta badan yang menanggulangi permasalahan narkotika dapat meningkatkan kapasitas wawasannya dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif di Indonesia melalui pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari Thailand

---

<sup>90</sup> Ibid., hal. 61.

<sup>91</sup> detiknews, "Buah Tangan Doi Tung, Karya Lokal Menembus Dunia", 2012, <https://news.detik.com/berita/d-1843738/buah-tangan-doi-tung-karya-lokal-menembus-dunia->, diakses pada 8 April 2023.

sehingga keberhasilan dalam menciptakan kawasan produktif yang terbebas dari narkoba dapat tercapai.

#### **F. Implementasi Kerja Sama : Alih Fungsi Lahan dan Profesi dalam *Grand Design Alternative Development (GDAD)***

*Grand Design Alternative Development (GDAD)* merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan program upaya tanggap darurat narkoba nasional yang disusun dengan menerapkan kegiatan alih fungsi lahan dari tanaman ganja menjadi komoditas unggulan daerah yang lebih produktif serta kegiatan alih profesi petani ganja menjadi petani komoditas unggulan. Kegiatan ini dibentuk untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan membentuk kesadaran akan hukum yang berlandaskan kemitraan dan sinergitas.

BNN RI selaku aktor sekaligus implementor dalam mengimplementasikan GDAD ini menjadikan wilayah di Provinsi Aceh yang meliputi Aceh Besar, Bireuen, dan Gayo Lues sebagai sasaran pelaksanaan program Pembangunan Alternatif. Pemilihan wilayah tersebut didasari oleh permasalahan narkoba jenis ganja dan tingkat kemiskinan di ketiga wilayah tersebut.

Dalam penyusunan program *Grand Design Alternative Development (2016-2025)*, terdapat banyak proses yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI seperti kerja sama dengan Thailand sebagai negara yang telah berpengalaman dan berhasil dalam menjalankan program serupa. Pelaksanaan program Pembangunan Alternatif juga didukung oleh Mah Fae Luang *Foundation* sebagai yayasan yang menjalankan program tersebut di Thailand



Pemetaan potensi wilayah dilakukan dengan mengidentifikasi *Strong* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman). Dengan dilakukannya analisis tersebut maka dapat diketahui langkah-langkah yang sesuai guna mengembangkan potensi di wilayah tersebut.

Guna identifikasi *Strong* (kekuatan) bisa diamati melalui komunikasi dan infrastruktur, sumber daya alam maupun manusia, kelembagaan atau institusi, program kerja pemerintahan daerah, kesiapan pasar, dan keunggulan daerah setempat.

Guna identifikasi *Weakness* (kelemahan) bisa diamati melalui tidak memadainya berbagai fasilitas umum yang tersedia, masyarakat yang tidak begitu aktif dalam program kerja pemerintah, akses komunikasi antar masyarakat yang kurang maksimal, pelayanan aparat kepada pemerintah yang belum begitu maksimal, serta belum maksimal pelaksanaan program kerja yang disusun pemerintah di wilayah tersebut

Guna identifikasi *Opportunity* (peluang) bisa diamati melalui antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial bersama, pengoptimalan ekonomi melalui berbagai usaha di pasar, produk-produk andalan di wilayah tersebut, dan situs-situs bersejarah yang terawat.

Sedangkan guna identifikasi *Threat* (ancaman) bisa diamati melalui situasi penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut yang tersebar dikalangan masyarakat, banyaknya isu kejahatan di daerah tersebut, tempat hiburan malam yang buka sampai dini hari, lokasi pelabuhan tikus yang

berada di dekat laut serta berdampingan dengan tempat-tempat yang dijadikan transit.

b. Prosedur Memetakan Potensi Wilayah dan Masyarakat

Tahap awal dalam melaksanakan program pembangunan alternatif, sebelumnya area rawan narkoba dipilih dulu berdasarkan posisi rangking kerawanannya terhadap narkoba. Lalu setelah itu baru dilaksanakan pemetaan potensi dan masyarakat untuk mengubah kawasan rawan menjadi kawasan yang produktif dan unggul dalam mengembangkan potensi daerahnya.

Terdapat langkah-langkah yang dipilih guna melakukan pemetaan pengembangan potensi di kawasan rawan, yakni melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi dengan kelompok-kelompok seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan para wirausaha, serta melakukan pencatatan terhadap data-data.

Tujuan dari penggunaan metode *Focus Group Discussion* ini yaitu guna menyatukan perbedaan pendapat, visi misi, serta menggelorakan program P4GN melalui bidang kewirausahaan sebagai pendekatan humanis guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba.

Tak lupa pula dalam hal ini juga mengundang para tokoh masyarakat yang bertujuan agar bisa mengajak warganya guna mendorong keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Lalu dilakukan audiensi dan kunjungan kepada para masyarakat, pejabat pemerintahan dan daerah,

serta pemangku kepentingan wilayah tersebut untuk melaksanakan advokasi, komunikasi, pengamatan, koordinasi, serta bersinergitas supaya saling mempunyai peran dan tugas dalam pelaksanaan program P4GN melalui kewirausahaan di kawasan tersebut.<sup>93</sup>

c. Target Sasaran Pemetaan Potensi Kawasan dan Masyarakat

Dalam melakukan pemetaan potensi kawasan dan masyarakat, langkah yang dilakukan yaitu berfokus melakukan pemetaan pada sasaran dari berbagai pihak antara lain: LSM, BAPPEDA di daerah tersebut, BPS, dinas-dinas setempat, lembaga pemerintahan setempat, pasar, koperasi simpan pinjam, UMKM di daerah tersebut, perusahaan setempat, dan kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat setempat.

d. Target Keluaran dan Hasil Pemetaan Potensi

Melalui langkah pemetaan potensi daerah dan masyarakat serta analisis SWOT, maka hasil yang diharapkan yaitu laporan informasi yang rinci mengenai hasil pemetaan potensi melalui analisis SWOT serta strategi yang akan dikembangkan. Sedangkan target dari hasil pemetaan potensi daerah dapat bermanfaat bagi perencanaan kegiatan wirausaha. Mengenai rencana kegiatan antara lain mencakup melakukan pemilihan terhadap peserta kewirausahaan, pembinaan terhadap pendamping wilayah, penentuan tempat, waktu, dan jadwal kegiatan, informan dan pemandu sebagai pengajar, penawaran jenis tipe kewirausahaan, materi dan cara

---

<sup>93</sup> BNN RI, *PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI GDAD DI PROVINSI ACEH*, hal. 27-28.

pengajaran, persiapan alat dan bahan, kemitraan yang akan dikembangkan, dana dan sumber dana, tahap monitoring, evaluasi, dan laporan.

Guna memudahkan dalam keberhasilan program maka sasaran dan hasil pemetaan tersebut harus memiliki panduan yang telah disepakati dalam kegiatan rapat kerja serta dimusyawarahkan kepada sasaran pelaksanaan program bersama masyarakat.<sup>94</sup>

e. Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan

Guna mengubah status kerawanan daerah dan masyarakat terhadap narkoba, maka dibutuhkan berbagai solusi seperti dengan cara dikembangkannya kapasitas melalui berbagai wirausaha. Dengan demikian, melalui kegiatan kewirausahaan masyarakat dapat belajar dan mendapatkan bekal untuk mengasah kemampuan di bidang usaha sehingga mampu menghasilkan berbagai produk yang berkualitas dan bernilai jual sehingga hal ini juga mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.

f. Pengukuran Keberhasilan Program

Setelah melalui beberapa proses tahapan dan diimplementasikannya program tersebut, pada tahun 2019 telah berhasil mengalihfungsikan lahan kawasan rawan narkoba menjadi ladang yang lebih produktif dan alih profesi petani ganja menjadi petani tanaman komoditas yaitu sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Ibid., hal. 29-30.







menjadi lahan yang lebih produktif, seperti lahan pertanian (kopi dan jagung) atau peternakan. Tercatat bahwa penurunan jumlah ladang ganja yang dieradikasi sejak tahun 2016 yaitu 487 hektar hingga terakhir 2022 yaitu 63,9 hektar.<sup>98</sup>

Dalam menjalankan program ini, BNN RI selaku implementor juga mendapat dukungan dari dunia usaha melalui terjalinnya kemitraan dengan dunia usaha untuk pembelian komoditas alternatif GDAD baik jagung oleh perusahaan Bintang Toedjoe dan Japfa Comfeed Indonesia<sup>99</sup> dan Golden Daru Utama, sedangkan untuk komoditas kopi yaitu perusahaan Ujang Jaya Internasional atau PT. Starbucks.<sup>100</sup> Selain itu, para perusahaan juga memberi dukungan guna mengembangkan peternakan ikan dan unggas serta mengembangkan produksi tanaman herbal seperti jahe merah sebagai bahan produksi jamu.

Meskipun dalam pelaksanaan GDAD tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, namun ditemukan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah pelaksanaan program terutama wilayah *pilot project* yakni Aceh Besar, Bireuen, dan Gayo Lues menunjukkan kondisi sosial masyarakat yang kurang peduli terhadap bahaya narkoba hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus-kasus penyeludupan narkoba di wilayah tersebut seperti halnya pernah lakukan pengungkapan lima pelaku

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>99</sup> Japfa, "Dukung Pemerintah Berantas Narkoba, JAPFA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BNN", diakses 3 April 2023, <https://www.japfacomfeed.co.id/id/about-us/news-bulletin/dukung-pemerintah-berantas-narkoba-japfa-tandatangani-nota-kesepahaman-dengan-bnn>, diakses pada 3 April 2023.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Dwi Dhini Mandiri, Selaku Kepala Seksi Kerja sama Regional dan Analis Kerja sama Regional BNN RI.



*meeting* yang pertama di sebuah Hotel Riverie by Katathani Chiang Rai, Thailand pada tanggal 25-28 November 2019. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penerapan MoU yang telah disepakati pada 8 Desember 2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BNN RI juga melakukan kunjungan ke wilayah Doi Tung, Thailand (wilayah yang berhasil dalam program Pembangunan Alternatif).

Pada pertemuan tersebut, perwakilan BNN RI yang hadir diketuai oleh kepala BNN RI yaitu Komjen Pol Drs. Heru Winarko, S.H. dan ditemani oleh Irjen Pol Drs. Dunan Ismail Isja, MM dari Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Irjen Pol Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H., M.Hum dari Deputy Pencegahan, Direktur Interdiksi Deputy Bidang Pemberantasan, Kepala Pusat Laboratorium BNN, Analis Pemetaan Jaringan Direktorat P2, Kasubdit Kerja Sama Regional dan Internasional, Kasi Kerja Sama Regional, Kasi Pemetaan dan Analis Masyarakat Pedesaan dan Pelaksana Bimbingan Teknis Bidang Dayatif. Sedangkan perwakilan dari Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand diwakili oleh Sekretaris Umum Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand dan ditemani oleh 4 Direktur, Advisor, Analis, dan Pakar.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Dayamas, “*Bilateral Meeting* Indonesia dan Thailand dalam P4GN”, BNN RI, 2019, <https://bnn.go.id/bilateral-meeting-indonesia-thailand-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan/>, diakses pada 4 April 2023.



pelaksanaan program tersebut untuk mengurangi permasalahan narkoba dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat disana.<sup>104</sup>

Sedangkan kepala BNN RI dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kondisi wilayah Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi para bandar untuk mengedarkan narkoba baik dari jalur darat, laut, maupun udara. Kepala BNN RI berharap bahwa pihak ONCB Thailand mau untuk terus bersinergitas membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba salah satunya di bidang Pembangunan Alternatif serta mengucapkan terima kasih kepada ONCB karena dalam pertukaran informasi terkait situasi narkoba dapat membantu Indonesia dalam mengurangi peredaran gelap narkoba dari kawasan *Golden Triangle*.

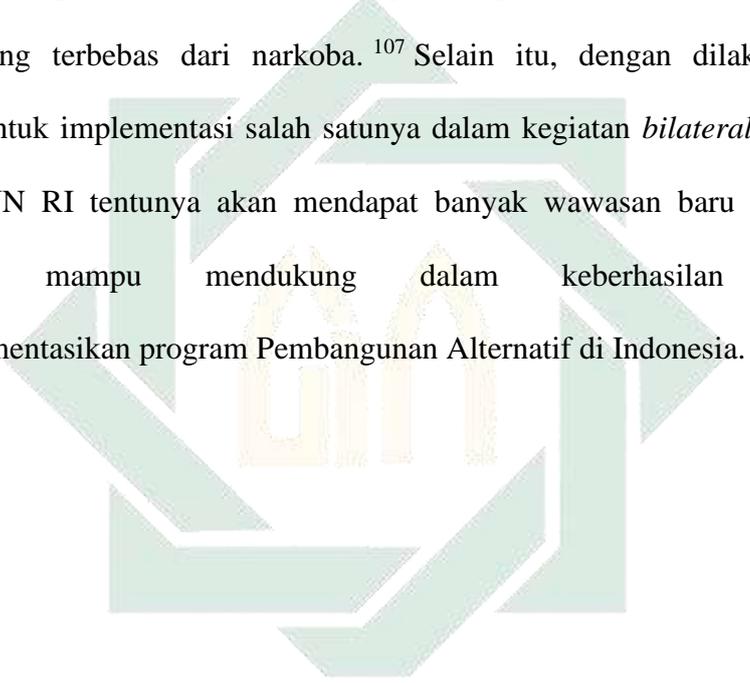
Inti pokok pembahasan dari pertemuan *bilateral meeting* yang pertama tersebut yaitu pertama, BNN RI dan ONCB sepakat untuk lebih meningkatkan pertukaran informasi intelijen serta melaksanakan *joint operation* antara Indonesia dan Thailand melalui ASEAN *Airport Interdiction Task Force (AAITF)* dan ASEAN *Sea Port Interdiction Task Force (ASITF)*. Kedua, BNN RI dan ONCB Thailand akan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui berbagai kegiatan pelatihan, diantaranya kegiatan INARCELL di PPSDM Lido serta kegiatan pelatihan lain yang dilaksanakan Thailand. Ketiga, pelaksanaan program Pembangunan Alternatif dengan mengganti tanaman narkoba menjadi tanaman lainnya yang lebih produktif seperti jagung serta kedua pihak saling bertukar pengalaman dan informasi

---

<sup>104</sup> *Ibid.*,



Selain itu, dalam *bilateral meeting* tersebut juga membahas mengenai program Pembangunan Alternatif terutama pada pelatihan *life skill* dan rehabilitasi. Melalui pertemuan tersebut, keduanya berharap agar kerja sama yang terjalin dapat semakin erat sehingga mampu merealisasikan kawasan ASEAN yang terbebas dari narkoba.<sup>107</sup> Selain itu, dengan dilakukannya berbagai bentuk implementasi salah satunya dalam kegiatan *bilateral meeting* tersebut BNN RI tentunya akan mendapat banyak wawasan baru sehingga diharapkan mampu mendukung dalam keberhasilan dalam mengimplementasikan program Pembangunan Alternatif di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>107</sup> Humas BNN RI, “BNN RI dan ONCB Thailand Gelar Bilateral Meeting Kokohkan Kerja Sama”, BNN RI, 2022, <https://bnn.go.id/bnn-ri-oncb-thailand-gelar-bilateral-meeting-kokohkan/>, diakses pada 4 April 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menekan permasalahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah Indonesia melalui BNN RI menjalin kerja sama dengan ONCB Thailand dalam program Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) yang dijalankan di wilayah Provinsi Aceh sebagai sasaran pelaksanaan program. Kerja sama tersebut kemudian diimplementasikan oleh BNN RI ke dalam empat bentuk kegiatan. Pertama, bentuk implementasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan program Pembangunan Alternatif yang dilakukan oleh BNN RI dengan membentuk forum diskusi dengan Pemerintah Thailand dan Yayasan Mae Fah Luang mengenai strategi P4GN, kunjungan tim ahli dari Doi Tung *Development Project* Thailand yang berjumlah 31 ahli ke daerah *pilot project* di Provinsi Aceh yang meliputi daerah Lamteuba dan di daerah Maheng. Di samping itu, Mae Fah Luang turut membangun program membuat kaki tiruan (Prosthesis) dan juga pernah tergabung dalam pelatihan bersama dalam *International Training of Narcotics* di Lido Bogor dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dalam penegakkan hukum terkait larangan penyalahgunaan narkoba.

Kedua, implementasi kerja sama program Pembangunan Alternatif dalam kunjungan kerja melalui praktik lapangan. Pada September 2017 BNN RI melakukan kegiatan praktik lapangan ke Thailand. Kunjungan pertama

dilakukan dengan pertemuan resmi bersama wakil duta besar RI untuk Thailand yaitu Toferry. Kemudian, pihak BNN RI bertemu dengan sekretaris umum jenderal ONCB serta dilanjut dengan mendatangi laboratorium Badan Pengawas Kerajaan Thailand. Selanjutnya BNN RI juga mengunjungi ketua Mae Fah Luang *Foundation* dan berkunjung ke perusahaan kopi serta kebun kacang jenis macadamia untuk mempelajari cara pembibitan. Kemudian BNN RI mampir untuk melihat kerajinan buatan tangan berupa hasil tenun serta berkunjung ke museum *Hall of Opium* untuk mendapatkan informasi sebaran opium di seluruh dunia.

Ketiga, bentuk implementasi melalui kegiatan alih fungsi lahan dan profesi dalam program *Grand Design Alternative Development*. Dalam kegiatan alih fungsi ini, Thailand memberikan informasi mengenai langkah penyusunan serta mengelola wilayah kultivasi tanaman narkotika yang kemudian dikembangkan oleh BNN RI dengan merilis *Grand Design Alternative Development* (2016-2025) sebagai program Pembangunan Alternatif dalam lingkup alih fungsi lahan dan profesi dengan daerah Aceh Besar, Bireuen, dan Gayo Lues dijadikan sebagai *pilot project* pelaksanaan program Pembangunan Alternatif.

Keempat, implementasi kerja sama melalui kegiatan bentuk *bilateral meeting*. *Bilateral meeting* ini dilakukan dua kali oleh BNN RI dan Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB). Pertama dilakukan pada tahun 2019 di Hotel Riverie by Katathani dengan pembahasan bidang P4GN, pertukaran informasi terkait program Pembangunan Alternatif, serta

penjagaan wilayah darat, laut, dan udara dari perdagangan ilegal narkoba. Sedangkan *bilateral meeting* kedua dilaksanakan pada tahun 2022 di Hotel Merusaka, Bali. Topik yang dibahas pada rapat tersebut terkait Pembangunan Alternatif yang merujuk pada pelatihan *life skill*, pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam implementasi program Pembangunan Alternatif di atas terdapat indikator-indikator dari pelaksanaan program yaitu diawali dengan penandatanganan MoU sebagai pedoman pelaksanaan program kemudian ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan Program Pembangunan Alternatif yang dijalankan oleh BNN RI sebagai aktor sekaligus implementor pelaksanaan program. Provinsi Aceh dijadikan sebagai daerah *pilot project* sekaligus sasaran dari pelaksanaan program tersebut dengan tujuan mengurangi permasalahan ganja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Indonesia**

Bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui BNN RI diharapkan ke depannya dapat lebih meningkatkan lagi kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara dalam program Pembangunan Alternatif sehingga pemerintah Indonesia dapat mendapatkan informasi lebih jauh lagi dalam mengimplementasikan program tersebut di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula agar pemerintah memberikan pemahaman yang lebih giat lagi terkait apa itu program Pembangunan Alternatif kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami dengan benar terkait program tersebut

serta dampak positif yang didapatkan jika program tersebut dilaksanakan dengan serius oleh berbagai pihak.

## 2. Bagi Akademisi

Berdasarkan penelitian di atas, ditemukan bahwa program Pembangunan Alternatif tidak hanya dilakukan di daerah yang dijadikan sebagai *pilot project*, melainkan juga pernah dilakukan di daerah lain yang juga mengalami permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan konsep *Community Development*. Oleh sebab itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian oleh peneliti selanjutnya. Selain itu, dikarenakan pada penelitian ini hanya menggali informasi dari satu narasumber saja, maka pada penelitian selanjutnya bisa dilakukan triangulasi teknik dan waktu guna menunjang kevalidan data yang diperoleh.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- BNN RI. 2019. *PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI GDAD DI PROVINSI ACEH*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI.
- BNN RI. 2022 *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Republik Indonesia.
- Bungin, Buhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Chalk, Peter. 1977. *Grey Area Phenomena in SouthEast Asia: Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism*. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pasific and Asian Studies the Australian National University.
- Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi. 2014. *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia*. 1 ed. Jakarta, 2011. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Saldaña Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3 edition.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Perwita dan Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakrya.

















- Savitri, Putu Indah. “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkatkan jadi 3,66 Juta Jiwa.” *antaranews*, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>.
- Setyadi, Agus. “Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin di Indonesia.” *detiknews*. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera/amp#referrer=https://www.google.com&csi=0>.
- Setyadi, Agus. “Data BPS: Aceh Masuk 5 Provinsi Miskin di Indonesia”. *detikNews*. 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5925014/data-bps-aceh-masuk-5-provinsi-miskin-di-indonesia> diakses pada 7 Juli 2023.
- Setyadi, Agus. “Ini Penyebab Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Bertambah Menurut Pemprov.” *detikSumut*, 2023.
- Tafsir Web. “Surat Al-Maidah Ayat 90.” Diakses 1 Juni 2023. Tafsir Web, “Surat Al-Maidah Ayat 90”, <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>.
- Tri Laksono, Nugroho. “BNN akan Sulap Ladang Ganja Aceh Jadi Agrowisata dan Agrobisnis.” *detiknews*, 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3365987/bnn-akan-sulap-ladang-ganja-aceh-jadi-agrowisata-dan-agrobisnis>.
- United Nations. “Capacity-Building.” Diakses 3 April 2023. <https://www.un.org/en/academic-impact/capacity-building#:~:text=Capacity%2Dbuilding%20is%20defined%20as,in%20a%20fast%2Dchanging%20world>.

**Internet**

Japfa. “Dukung Pemerintah Berantas Narkoba, JAPFA Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BNN.” Diakses 3 April 2023.

<https://www.japfacomfeed.co.id/id/about-us/news-bulletin/dukung-pemerintah-berantas-narkoba-japfa-tandatangani-nota-kesepahaman-dengan-bnn>.

Rasidan. “BNN Musnahkan 5 Hektare ladang Ganja Siap Panen di Gayo Lues, Tim Jalan Kaki 6 jam ke Lokasi”. 2022. Serambinews.

<https://aceh.trinumnews.com/2022/06/01/bnn-musnahkan-5-hektarre-ladang-ganja-siap-panen-di-gayo-lues-tim-jalan-kaki-6-jm-ke-lokasi> diakses pada 2 Juli 2023.

Tommy. “Polisi Temukan 6 Hektar lahan ganja di Pedalaman Bireuen”. 2022.

<https://www.ajnn.net/news/polisi-temukan-6-hektar-ladang-ganja-di-pedalaman-bireuen/index.html> diakses pada 2 Juli 2023.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A